

**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN
PELAYANAN JASA PENCEGAHAN
PENCEMARAN INDUSTRI
BAGIAN ANGGARAN 019.07.247161**



**Laporan Keuangan
Badan Layanan Umum**

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025
(Audited)

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6 Semarang 50136
Telp. 024-8316315, 8314312 Fax. 024-8414811

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perindustrian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai PSAP 13 dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Semarang, 4 Mei 2026

Kepala BBSPJPPI, *dmr*



Sofyari Rahman

NIP. 19840325 200911 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Lampiran	ix
Pernyataan Tanggung Jawab	xi
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Laporan Arus Kas	12
VI. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	14
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	15
A. Penjelasan Umum	15
A.1. Dasar Hukum	15
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri	15
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	18
A.4. Basis Akuntansi	19
A.5. Dasar Pengukuran	19
A.6. Kebijakan Akuntansi	20
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	30
B.1. Pendapatan	32
B.2. Belanja	36
B.3. Belanja Pegawai	37
B.4. Belanja Barang	38
B.5. Belanja Modal	40
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	46
C.1. Aset Lancar	46
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	46
C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan	46
C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas	47
C.1.4. Kas Pada Badan Layanan Umum	47
C.1.5. Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak	48
C.1.6. Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	48
C.1.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	49
C.1.8. Belanja Dibayar di Muka	50
C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima	50
C.1.10. Persediaan	51
C.2. Aset Tetap	52
C.2.1. Tanah	52
C.2.2. Peralatan dan Mesin	53

C.2.3.	Gedung dan Bangunan	58
C.2.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	58
C.2.5.	Aset Tetap Lainnya	59
C.2.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	59
C.2.7.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	60
C.3.	Aset Lainnya	60
C.3.1.	Aset Tak Berwujud	61
C.3.2.	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	61
C.3.3.	Aset Lain-lain	62
C.3.4.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	62
C.4.	Kewajiban Jangka Pendek	63
C.4.1.	Utang Kepada Pihak Ketiga	63
C.4.2.	Uang Muka Dari KPPN	64
C.4.3.	Pendapatan Yang Ditangguhkan	64
C.4.4.	Pendapatan Diterima di Muka	64
C.4.5.	Utang Yang Belum Ditagihkan	65
C.4.6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	65
C.5.	Ekuitas	65
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	66
D.1.	Pendapatan Operasional – LO	66
D.2.	Beban Pegawai	68
D.3.	Beban Persediaan	70
D.4.	Beban Barang dan Jasa	71
D.5.	Beban Pemeliharaan	73
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	75
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	76
D.8.	Beban Bantuan Sosial	76
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	77
D.10.	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	77
D.11.	Beban Lain-lain	78
D.12.	Kegiatan Non Operasional	78
D.13.	Pos Luar Biasa	79
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	80
E.1.	Ekuitas Awal	80
E.2.	Surplus (Defisit) LO	80
E.3.	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	80
E.3.1	Penyesuaian Nilai Aset	80
E.3.2	Koreksi Nilai Persediaan	81
E.3.3	Koreksi Atas Reklasifikasi	81
E.3.4	Selisih Revaluasi Aset tetap	81
E.3.5	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	81
E.3.6	Koreksi Lain-Lain	81
E.4.	Transaksi Antar Entitas	82
E.4.1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	82
E.4.2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	83

E.4.3	Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung	83
E.5.	Ekuitas Akhir	83
F.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas	84
G.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan SAL	91
H.	Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	93
	Lampiran A1	102

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	1
Tabel 2 : Ringkasan Neraca	2
Tabel 3 : Ringkasan Laporan Operasional	2
Tabel 4 : Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas	3
Tabel 5 : Ringkasan Laporan Arus Kas	4
Tabel 6 : Ringkasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	4
Tabel 7 : Perhitungan Penyisihan Piutang	23
Tabel 8 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	27
Tabel 9 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	28
Tabel 10 : Rincian Perubahan DIPA	30
Tabel 11 : Rincian Anggaran Penanganan Pandemi COVID-19	30
Tabel 12 : Rincian Anggaran Tagging Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	31
Tabel 13 : Revisi DIPA BBSPJPI	31
Tabel 14 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025	33
Tabel 15 : Rincian Pendapatan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	34
Tabel 16 : Rincian Pendapatan Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah per 31 Desember 2025	35
Tabel 17 : Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 30 Desember 2024	36
Tabel 18 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025	36
Tabel 19 : Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	37
Tabel 20 : Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	38
Tabel 21 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	39
Tabel 22 : Rincian Belanja Barang Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	39
Tabel 23 : Rincian Belanja Jasa BLU dalam Satu Kementerian per 31 Desember 2025	40
Tabel 24 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	41
Tabel 25 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 dan 2024	41
Tabel 26 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024	42

Tabel 27	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024	42
Tabel 28	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2025 dan 2024	42
Tabel 29	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2025 dan 2024	42
Tabel 30	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU Tahun 2025 dan 2024	43
Tabel 31	: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	46
Tabel 32	: Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	47
Tabel 33	: Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	47
Tabel 34	: Rincian Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	48
Tabel 35	: Rincian Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	48
Tabel 36	: Rincian Piutang Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	49
Tabel 37	: Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	49
Tabel 38	: Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	50
Tabel 39	: Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	51
Tabel 40	: Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	51
Tabel 41	: Rincian Mutasi Persediaan	52
Tabel 42	: Rincian Mutasi Tanah	53
Tabel 43	: Rincian Saldo Tanah	53
Tabel 44	: Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin	53
Tabel 45	: Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan	58
Tabel 46	: Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	59
Tabel 47	: Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya	59
Tabel 48	: Rincian Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan	60
Tabel 49	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	60
Tabel 50	: Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud	61
Tabel 51	: Rincian Aset Tak Berwujud	61
Tabel 52	: Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	62
Tabel 53	: Rincian Mutasi Aset Lain-Lain	62

Tabel 54	:	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	63
Tabel 55	:	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	64
Tabel 56	:	Rincian Pendapatan Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	66
Tabel 57	:	Selisih Pendapatan LO dan LRA per 31 Desember 2025	67
Tabel 58	:	Rincian Selisih Pendapatan per 31 Desember 2025	68
Tabel 59	:	Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	68
Tabel 60	:	Selisih Beban Pegawai LO dan LRA per 31 Desember 2025	69
Tabel 61	:	Rincian Selisih Beban Pegawai per 31 Desember 2025	69
Tabel 62	:	Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	70
Tabel 63	:	Selisih Beban Persediaan LO dan LRA per 31 Desember 2025	70
Tabel 64	:	Rincian Selisih Beban Persediaan per 31 Desember 2025	71
Tabel 65	:	Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	72
Tabel 66	:	Selisih Beban Barang dan Jasa LO dan LRA per 31 Desember 2025	72
Tabel 67	:	Rincian Selisih Beban Barang dan Jasa LO dan LRA per 31 Desember 2025	73
Tabel 68	:	Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	74
Tabel 69	:	Selisih Beban Pemeliharaan LO dan LRA per 31 Desember 2025	74
Tabel 70	:	Rincian Selisih Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025	75
Tabel 71	:	Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	75
Tabel 72	:	Selisih Beban Perjalanan Dinas LO dan LRA per 31 Desember 2025	76
Tabel 73	:	Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	76
Tabel 74	:	Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	77
Tabel 75	:	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	77
Tabel 76	:	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	78
Tabel 77	:	Rincian Beban Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	78
Tabel 78	:	Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	79
Tabel 79	:	Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	79
Tabel 80	:	Rincian Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2025	82
Tabel 81	:	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025	82
Tabel 82	:	Rincian Saldo Awal Kas per 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024	84

Tabel 83	:	Kenaikan (Penurunan) Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	84
Tabel 84	:	Rincian Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	85
Tabel 85	:	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	86
Tabel 86	:	Rincian Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	86
Tabel 87	:	Rincian Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	87
Tabel 88	:	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	88
Tabel 89	:	Rincian Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	88
Tabel 90	:	Rincian Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	88
Tabel 91	:	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	89
Tabel 92	:	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	90
Tabel 93	:	Rincian Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	90
Tabel 94	:	Rincian Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	90
Tabel 95	:	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	91
Tabel 96	:	Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	92
Tabel 97	:	Pagu Efektif per Jenis Belanja Tahun 2025	93
Tabel 98	:	Perbandingan Pagu Efektif dan Realisasi per Jenis Belanja Tahun 2025	93

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lamp. 1 : Laporan-Laporan Pendukung Catatan Atas Laporan Keuangan	103
Lamp. 2 : Laporan Realisasi Anggaran	104
Lamp. 3 : LRA Pendapatan dan Hibah dan LRA Pengembalian Pendapatan dan Hibah	105
Lamp. 4 : LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	106
Lamp. 5 : Laporan dari Aplikasi SAKTI	107
- Neraca	
- Neraca Percobaan Akrua (Saldo Awal)	
- Neraca Percobaan Akrua	
- Neraca Percobaan Kas	
- Laporan Operasional	
- Laporan Perubahan Ekuitas	
- Laporan Arus Kas	
- Laporan Perubahan SAL	
Lamp. 6 : Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan	108
- Laporan Posisi BMN di Neraca	
- Intrakomptabel	
- Ekstrakomptabel	
- Gabungan	
- Aset Tak Berwujud	
- Laporan Penyusutan	
- Laporan Kondisi Barang Rusak Berat	
- Dokumen Lelang	
Lamp. 7 : Laporan Persediaan	109
- Berita Acara Stock Opname Fisik	
- Laporan Posisi Barang Persediaan di Neraca	
- Laporan Barang Persediaan	
- Laporan Mutasi Persediaan	
- Persediaan Dalam Proses	
Lamp. 8 : Daftar Rekening Koran Bank	110
Lamp. 9 : Surat Setoran Bukan Pajak	111
Lamp. 10 : Piutang	112
- Daftar Piutang dan Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	
- Data Piutang Negara yang Telah Diserahkan ke KPKNL	
- Data Penanggung Hutang	
Lamp. 11 : Pendapatan yang Masih Harus Diterima	113

Lamp. 12	:	Pendapatan Diterima Di Muka	114
Lamp. 13	:	Daftar Mutasi Utang Kepada Pihak Ketiga	115
Lamp. 14	:	LPJ Bendahara Badan Layanan Umum	116
Lamp. 15	:	Memo Penyesuaian dan Laporan Monitoring Jurnal	117
Lamp. 16	:	Berita Acara Rekonsiliasi	118
Lamp. 17	:	Lampiran KDP	119
Lamp. 18	:	Lampiran Transfer Masuk dan Transfer Keluar	120
Lamp. 19	:	Lampiran Hibah	121
Lamp. 20	:	Lampiran Selisih LO vs LRA	122
Lamp. 21	:	Lampiran Capaian Rincian Output	123
Lamp. 22	:	Cetakan Laporan Keuangan Tahun 2025 (MONSAKTI)	124
Lamp. 23	:	Analisis Laporan Keuangan Tahun 2025	125
Lamp. 24	:	Telaah Laporan Keuangan Tahun 2025	126

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN
PENCEMARAN INDUSTRI
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Laporan Keuangan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, 4 Mei 2026

N Kepala BBSPJPPI, *dm*



Sofyari Rahman

NIP. 19840325 200911 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp20.537.608.928,00 atau mencapai 109,91 persen dari Estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp18.686.000.000,00. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp35.173.183.417,00 atau mencapai 86,92 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp40.465.963.000,00.

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025		% Realisasi	31 Desember 2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Pendapatan Negara	18.686.000.000,00	20.537.608.928,00	109,91	18.475.675.623,00
Belanja Negara	40.465.963.000,00	35.173.183.417,00	86,92	41.608.652.726,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp135.150.926.930,00 yang terdiri dari Aset Lancar (neto) sebesar Rp7.695.261.780,00, Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00, Aset Tetap (neto) sebesar Rp127.393.552.450,00, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp62.112.700,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.474.653.824,00 dan Rp133.676.273.106,00.

Tabel 2
Ringkasan Neraca
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	7.695.261.780,00	5.809.042.865,00	1.886.218.915,00	32,47
Aset Tetap	127.393.552.450,00	128.379.012.549,00	(985.460.099,00)	(0,77)
Piutang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	62.112.700,00	73.017.876,00	(10.905.176,00)	(14,93)
Jumlah Aset	135.150.926.930,00	134.261.073.290,00	889.853.640,00	0,66
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	1.474.653.824,00	3.169.759.940,00	(1.695.106.116,00)	(53,48)
Jumlah Kewajiban	1.474.653.824,00	3.169.759.940,00	(1.695.106.116,00)	(53,48)
Ekuitas				
Ekuitas	133.676.273.106,00	131.091.313.350,00	2.584.959.756,00	1,97
Jumlah Ekuitas	133.676.273.106,00	131.091.313.350,00	2.584.959.756,00	1,97
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	135.150.926.930,00	134.261.073.290,00	889.853.640,00	0,66

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan dan beban operasional, surplus/defisit dari kegiatan operasional dan kegiatan non operasional, pos luar biasa, surplus/defisit dari pos luar biasa, serta surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah Rp37.425.085.225,00, sedangkan jumlah beban operasional adalah (Rp35.971.887.784,00), sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp1.453.197.441,00. Kegiatan Non Operasional mengalami surplus sebesar Rp76.724.589,00 dan Pos-pos Luar Biasa sebesar Rp0,00, sehingga entitas secara keseluruhan mengalami Surplus-LO sebesar Rp1.529.922.030,00.

Tabel 3
Ringkasan Laporan Operasional
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL		
Pendapatan Operasional	37.425.085.225,00	41.756.802.009,00
Beban Operasional	(35.971.887.784,00)	(37.338.306.874,00)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	1.453.197.441,00	4.418.495.135,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	17.232.003,00	(276.110.040,00)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	59.492.586,00	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	76.724.589,00	(276.110.040,00)
POS LUAR BIASA	0,00	0,00
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/Defisit LO	1.529.922.030,00	4.142.385.095,00

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp131.091.313.350,00 ditambah Surplus-LO sebesar Rp1.529.922.030,00, koreksi-koreksi sebesar Rp945.818.775,00 dan transaksi antar entitas sebesar Rp109.218.951,00, sehingga ekuitas entitas per tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp133.676.273.106,00.

*Tabel 4
Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	131.091.313.350,00	126.749.461.156,00
SURPLIS/DEFISIT - LO	1.529.922.030,00	4.142.385.095,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	945.818.775,00	199.467.099,00
Penyesuaian Nila Aset	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksio Atas Reklasifikasi	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	445.406.266,00	117.547.373,00
Lain-lain	500.412.509,00	81.919.726,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	109.218.951,00	0,00
KENAIKAN/PENUTRUNAN EKUITAS	2.584.959.756,00	4.341.852.194,00
EKUITAS AKHIR	133.676.273.106,00	131.091.313.350,00

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan berbagai unsur arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris. Saldo awal kas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp2.937.097.225,00 dengan kenaikan kas sebesar Rp2.645.295.367,00. Saldo akhir kas sebesar Rp5.582.392.592,00 dengan rincian saldo akhir kas pada BLU sebesar Rp5.582.392.592,00, saldo akhir kas lainnya dan setara kas sebesar Rp0,00, investasi jangka pendek BLU sebesar Rp0,00, saldo akhir dana kelola BLU sebesar Rp0,00, dan saldo akhir kas BLU yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp0,00. Rincian lainnya pos kas di neraca meliputi saldo akhir kas pada BLU (yang belum disahkan) sebesar Rp0,00 dan saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,00.

Tabel 5
Ringkasan Laporan Arus Kas
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
SALDO AWAL KAS	2.937.097.225,00	3.898.883.652,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	4.820.911.376,00	8.683.641.154,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(2.175.616.009,00)	(9.645.427.581,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	2.645.295.367,00	(961.786.427,00)
SALDO AKHIR KAS	5.582.392.592,00	2.937.097.225,00
Rincian Saldo Akhir Kas :		
Saldo Akhir Kas pada BLU	5.582.392.592,00	2.937.097.225,00
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek BLU	0,00	0,00
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :		
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

6. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih (SAL AWAL) pada tanggal 1 Januari 2025 adalah Rp2.937.097.225,00. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah **(Rp14.635.574.489,00)** dan penyesuaian transaksi BLU dengan BUN sebesar Rp17.280.869.856,00, sehingga menghasilkan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) setelah penyesuaian sebesar Rp2.645.295.367,00. Saldo anggaran lebih akhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp5.582.392.592,00.

Tabel 6
Ringkasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	2.937.097.225,00	3.898.883.652,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	(14.635.574.489,00)	(23.132.977.103,00)
Penyesuaian SiLPA/SiKPA	0,00	0,00
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	17.280.869.856,00	22.171.190.676,00
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0,00	0,00
Transaksi antar BLU	0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	2.645.295.367,00	(961.786.427,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.582.392.592,00	2.937.097.225,00

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN
PENCEMARAN INDUSTRI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DAN 31 DESEMBER 2024**

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025		% thd Angg	31 Desember 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
Pendapatan Perpajakan					
- Pajak Dalam Negeri					
- Pajak Perdagangan Internasional					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	18.686.000.000,00	20.537.608.928,00	109,91	18.475.675.623,00
- Pendapatan BLU			20.483.355.953,00		18.418.270.623,00
- Pendapatan PNPB Lainnya			54.252.975,00		57.405.000,00
Pendapatan Hibah					
JUMLAH PENDAPATAN		18.686.000.000,00	20.537.608.928,00	109,91	18.475.675.623,00
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	16.501.120.000,00	16.410.353.467,00	99,45	14.880.867.879,00
Belanja Barang	B.4	18.684.267.000,00	16.569.981.938,00	88,68	17.082.357.266,00
Belanja Modal	B.5	5.280.576.000,00	2.192.848.012,00	41,53	9.645.427.581,00
JUMLAH BELANJA		40.465.963.000,00	35.173.183.417,00	86,92	41.608.652.726,00

Semarang, 4 Mei 2026
Kenala BRSPJPPI,



Sofyari Rahman
NIP. 19840325 200911 1 001

*Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code, dan akan diarahkan pada laman <https://sindi.kemenperin.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://bsre.bssn.go.id/verify>

II. NERACA

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	
				Jumlah	%
ASET					
Aset Lancar	C.1				
Kas dan Bank					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas pada Badan Layanan Umum	C.1.4	5.582.392.592,00	2.937.097.225,00	2.645.295.367,00	90,06
Jumlah Kas dan Bank		5.582.392.592,00	2.937.097.225,00	2.645.295.367,00	90,06
Piutang					
Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak	C.1.5	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.1.6	8.145.000,00	16.745.000,00	(8.600.000,00)	(51,36)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.1.7	(8.145.000,00)	(666.550,00)	(7.478.450,00)	1.121,96
Jumlah Piutang (Bersih)		115.000,00	16.078.450,00	(15.963.450,00)	(99,28)
Belanja di bayar di muka	C.1.8	1.666.203,00	481.000,00	1.185.203,00	246,40
Pendapatan yang masih harus diterima	C.1.9	1.890.405.440,00	2.534.139.400,00	(643.733.960,00)	(25,40)
Persediaan	C.1.10	220.682.545,00	321.246.790,00	(100.564.245,00)	(31,30)
Jumlah Aset Lancar		7.695.261.780,00	5.809.042.865,00	1.886.218.915,00	32,47
Aset Tetap	C.2				
Tanah	C.2.1	100.566.767.000,00	100.566.767.000,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	57.703.088.944,00	57.168.492.456,00	534.596.488,00	0,94
Gedung dan Bangunan	C.2.3	19.837.934.088,00	18.513.497.851,00	1.324.436.237,00	7,15
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	21.907.000,00	21.907.000,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	10.343.211,00	10.343.211,00	0,00	0,00
KDP	C.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(50.746.487.793,00)	(47.901.994.969,00)	(2.844.492.824,00)	5,94
Jumlah Aset Tetap		127.393.552.450,00	128.379.012.549,00	(985.460.099,00)	(0,77)
Aset Lainnya	C.3				
Aset Tak Berwujud	C.3.1	1.614.974.000,00	1.614.974.000,00	0,00	0,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.2	0,00	70.317.876,00	(70.317.876,00)	(100,00)
Aset lain-lain	C.3.3	356.190.184,00	0,00	356.190.184,00	100,00
Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain	C.3.4	(1.909.051.484,00)	(1.612.274.000,00)	(296.777.484,00)	18,41
Jumlah Aset Lainnya		62.112.700,00	73.017.876,00	(10.905.176,00)	(14,93)
JUMLAH ASET		135.150.926.930,00	134.261.073.290,00	889.853.640,00	0,66
KEWAJIBAN					
Kewajiban Jangka Pendek	C.4				
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	700.346.824,00	1.565.141.350,00	(864.794.526,00)	(55,25)
Uang Muka dari KPPN	C.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.4	774.307.000,00	1.604.618.590,00	(830.311.590,00)	(51,75)
Utang yang Belum Ditagihkan	C.4.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.6	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.474.653.824,00	3.169.759.940,00	(1.695.106.116,00)	(53,48)
JUMLAH KEWAJIBAN		1.474.653.824,00	3.169.759.940,00	(1.695.106.116,00)	(53,48)

EKUITAS					
Ekuitas					
Ekuitas	C.5	133.676.273.106,00	131.091.313.350,00	2.584.959.756,00	1,97
JUMLAH EKUITAS		133.676.273.106,00	131.091.313.350,00	2.584.959.756,00	1,97
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		135.150.926.930,00	134.261.073.290,00	889.853.640,00	0,66

Semarang, 4 Mei 2026
Kepala BBSPJPPI,



Sofyari Rahman
NIP. 19840325 200911 1 001

*Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code, dan akan diarahkan pada laman <https://sindi.kemenperin.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://bsre.bssn.go.id/verify>

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN
PENCEMARAN INDUSTRI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DAN 31 DESEMBER 2024**

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1			
Pendapatan Alokasi APBN		17.335.122.831,00	22.228.595.676,00	(4.893.472.845,00)
Pendapatan Jasa Layanan dari		19.901.623.380,00	19.176.278.979,00	725.344.401,00
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas		86.891.000,00	292.609.490,00	(205.718.490,00)
Pendapatan BLU Lainnya		101.448.014,00	59.317.864,00	42.130.150,00
Jumlah Pendapatan Operasional		37.425.085.225,00	41.756.802.009,00	(4.331.716.784,00)
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	D.2	16.498.724.254,00	15.437.942.932,00	1.060.781.322,00
Beban Persediaan	D.3	1.357.340.889,00	1.088.707.444,00	268.633.445,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	7.447.371.054,00	8.868.445.524,00	(1.421.074.470,00)
Beban Pemeliharaan	D.5	2.710.371.745,00	3.274.673.302,00	(564.301.557,00)
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3.106.703.281,00	4.620.981.229,00	(1.514.277.948,00)
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	594.756.311,00	0,00	594.756.311,00
Beban Bantuan Sosial	D.8	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	4.249.141.800,00	4.046.889.893,00	202.251.907,00
Beban Penyisihan Piutang Tak	D.10	7.478.450,00	666.550,00	6.811.900,00
Beban Lain-lain	D.11	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Operasional		35.971.887.784,00	37.338.306.874,00	(1.366.419.090,00)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		1.453.197.441,00	4.418.495.135,00	(2.965.297.694,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12			
Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar				
Pendapatan Pelepasan Aset Non		17.232.003,00	0,00	17.232.003,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	276.110.040,00	(276.110.040,00)
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		17.232.003,00	(276.110.040,00)	293.342.043,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		113.745.561,00	57.405.000,00	56.340.561,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		54.252.975,00	57.405.000,00	(3.152.025,00)
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		59.492.586,00	0,00	59.492.586,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		76.724.589,00	(276.110.040,00)	352.834.629,00

POS LUAR BIASA	D.13			
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT – LO		1.529.922.030,00	4.142.385.095,00	(2.612.463.065,00)

Semarang, 4 Mei 2026
Kepala BBSPJPPI,



Sofyari Rahman
NIP. 19840325 200911 1 001

*Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code, dan akan diarahkan pada laman <https://sindi.kemenperin.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://bsre.bssn.go.id/verify>

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN
PENCEMARAN INDUSTRI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DAN 31 DESEMBER 2024**

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	PERIODE		Kenaikan (Penurunan)	
		31 Desember 2025	31 Desember 2024	Jumlah	%
EKUITAS AWAL	E.1	131.091.313.350,00	126.749.461.156,00	4.341.852.194,00	3,43
SURPLUS/DEFISIT – LO	E.2	1.529.922.030,00	4.142.385.095,00	(2.612.463.065,00)	(63,07)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN	E.3	945.818.775,00	199.467.099,00	746.351.676,00	374,17
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.5	445.406.266,00	117.547.373,00	327.858.893,00	278,92
Koreksi Lain-lain	E.3.6	500.412.509,00	81.919.726,00	418.492.783,00	510,86
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	E.4	109.218.951,00	0,00	109.218.951,00	100,00
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS		2.584.959.756,00	4.341.852.194,00	(1.756.892.438,00)	(40,46)
EKUITAS AKHIR	E.5	133.676.273.106,00	131.091.313.350,00	2.584.959.756,00	1,97

Semarang, 4 Mei 2026

k PI,



Sofyari Rahman
NIP. 19840325 200911 1 001

*Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code, dan akan diarahkan pada laman <https://sindi.kemenperin.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://bsre.bssn.go.id/verify>

V. LAPORAN ARUS KAS

**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN
PENCEMARAN INDUSTRI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DAN 31 DESEMBER 2024**

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	
			Jumlah	%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
ARUS MASUK KAS				
Pendapatan dari Alokasi APBN	17.335.122.831,00	22.228.595.676,00	(4.893.472.845,00)	(22,01)
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada	20.160.742.350,00	18.047.202.663,00	2.113.539.687,00	11,71
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas	89.441.000,00	306.257.490,00	(216.816.490,00)	(70,80)
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya	156.448.014,00	64.810.470,00	91.637.544,00	141,39
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU	76.724.589,00	0,00	76.724.589,00	100,00
Pendapatan PNPB Umum	37.020.972,00	57.405.000,00	(20.384.028,00)	(35,51)
JUMLAH ARUS MASUK KAS	37.855.499.756,00	40.704.271.299,00	(2.848.771.543,00)	(7,00)
ARUS KELUAR KAS				
Pembayaran Pegawai	(16.410.353.467,00)	(14.880.867.879,00)	(1.529.485.588,00)	10,28
Pembayaran Barang	(1.234.762.368,00)	(1.964.658.710,00)	729.896.342,00	(37,15)
Pembayaran jasa	(7.032.556.444,00)	(6.092.648.700,00)	(939.907.744,00)	15,43
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(3.865.356.853,00)	(2.805.543.508,00)	(1.059.813.345,00)	37,78
Pembayaran Pemeliharaan	(1.330.602.992,00)	(1.598.525.119,00)	267.922.127,00	(16,76)
Pembayaran Perjalanan Dinas	(3.106.703.281,00)	(4.620.981.229,00)	1.514.277.948,00	(32,77)
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Barang untuk Dijual/Diserahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran PNPB ke Kas Negara	(54.252.975,00)	(57.405.000,00)	3.152.025,00	(5,49)
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	(33.034.588.380,00)	(32.020.630.145,00)	(1.013.958.235,00)	3,17
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	4.820.911.376,00	8.683.641.154,00	(3.862.729.778,00)	(44,48)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
ARUS MASUK KAS				
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	17.232.003,00	0,00	17.232.003,00	100,00
Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ARUS MASUK KAS	17.232.003,00	0,00	17.232.003,00	100,00
ARUS KELUAR KAS				
Perolehan atas Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(2.192.848.012,00)	(9.435.284.370,00)	7.242.436.358,00	(76,76)
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	0,00	(210.143.211,00)	210.143.211,00	(100,00)
Pengeluaran Kembali Investasi yang Berasal	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	(2.192.848.012,00)	(9.645.427.581,00)	7.452.579.569,00	(77,27)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(2.175.616.009,00)	(9.645.427.581,00)	7.469.811.572,00	(77,44)

URAIAN	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	
			Jumlah	%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
ARUS MASUK KAS				
Penerimaan pembiayaan investasi yang berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pengembalian Setoran ke Kas Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ARUS MASUK KAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ARUS KELUAR KAS				
Penyetoran ke kas negara	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSISTORIS				
ARUS MASUK KAS				
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	795.826.000,00	0,00	795.826.000,00	100,00
JUMLAH ARUS MASUK KAS	795.826.000,00	0,00	795.826.000,00	100,00
ARUS KELUAR KAS				
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(795.826.000,00)	0,00	(795.826.000,00)	100,00
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	(795.826.000,00)	0,00	(795.826.000,00)	100,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSISTORIS	0,00	0,00	0,00	0,00
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	2.645.295.367,00	(961.786.427,00)	3.607.081.794,00	(375,04)
Penyesuaian atas selisih krus	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Awal Kas	2.937.097.225,00	3.898.883.652,00	(961.786.427,00)	(24,67)
Koreksi Saldo Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO AKHIR KAS	5.582.392.592,00	2.937.097.225,00	2.645.295.367,00	90,06
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :				
Saldo Akhir Kas pada BLU	5.582.392.592,00	2.937.097.225,00	2.645.295.367,00	90,06
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Rincian Saldo	5.582.392.592,00	2.937.097.225,00	2.645.295.367,00	90,06
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca				
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00

Semarang, 4 Mei 2026

Kepala BBSPIPPI,



Sofyari Rahman

NIP. 19840325 200911 1 001

*Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE). BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code, dan akan diarahkan pada laman <https://sindi.kemendin.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://bsre.bssn.go.id/verify>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

VI. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Jumlah	%
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	2.937.097.225,00	3.898.883.652,00	(961.786.427,00)	(24,67)
PENGUNAAN SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.937.097.225,00	3.898.883.652,00	(961.786.427,00)	(24,67)
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	(14.635.574.489,00)	(23.132.977.103,00)	8.497.402.614,00	(36,73)
Penyesuaian SiLPA/SiKPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	17.280.869.856,00	22.171.190.676,00	(4.890.320.820,00)	(22,06)
Pendapatan Alokasi APBN	17.335.122.831,00	22.228.595.676,00	(4.893.472.845,00)	(22,01)
Penyetoran PNPB ke kas negara	(54.252.975,00)	(57.405.000,00)	3.152.025,00	(5,49)
Penyetoran Surplus BLU ke kas negara	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa lebih/kurang Pembiayaan anggaran (SiLPA/SikPA) setelah penyesuaian	2.645.295.367,00	(961.786.427,00)	3.607.081.794,00	(375,04)
Sub Total	5.582.392.592,00	2.937.097.225,00	2.645.295.367,00	90,06
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	5.582.392.592,00	2.937.097.225,00	2.645.295.367,00	90,06

Semarang, 4 Mei 2026

IPPI,



Sofyari Rahman
NIP. 19840325 200911 1 001

*Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code, dan akan diarahkan pada laman <https://sindi.kemenperin.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://bsre.bssn.go.id/verify>

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 79/M-IND/PER/5/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan Akrua di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

Profil dan

Kebijakan Teknis

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri yang Semarang selanjutnya disebut BBSPJPPI adalah Satuan Kerja di bawah Kementerian Perindustrian yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), berdasarkan KMK 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Februari 2010 tentang Penetapan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri sebagai Badan Layanan Umum dengan status Penuh. Pelaksanaan Badan Layanan Umum Balai Besar Standardisasi dan

Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri memberikan fleksibilitas dan keleluasaan dalam mengelola sumber daya, pelaksanaan tugas operasional publik dan pengelolaan keuangan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif sehingga Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri mampu memenuhi tuntutan dan harapan pelanggan.

Sejarah Singkat

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) telah menempuh perjalanan panjang, sejak pertama kali didirikan pada tahun 1962 dengan nama 'Perwakilan Balai Penelitian Kimia Bogor' untuk Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, dalam perkembangannya telah terjadi perubahan nama sebagai berikut:

1964 – 1971 Unit Pn. Pr. “Nupiksa Yasa” dengan nama Balai Penelitian Kimia.

1971 – 1975 Unit Lembaga Penelitian dan Pendidikan Industri dengan nama Balai Penelitian Kimia.

1975 – 1980 Unit Penelitian dan Pengembangan Industri dan Kerajinan Rakyat dengan nama Balai Penelitian Kimia.

1980 – 2002 Unit Pelaksanan Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dengan nama 'Balai Penelitian dan Pengembangan Industri' atau disingkat 'Balai Industri Semarang'.

2002 – 2006 Unit Pelayanan Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dengan nama 'Balai Riset dan Standarisasi Industri dan Perdagangan' atau disingkat 'Baristand Indag Semarang'.

2006 – 2022 Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri dengan nama 'Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri' atau BBTPPI.

2022 – Kini Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri dengan nama 'Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri' atau BBSPJPPI'.

Visi

Visi BBSPJPPI adalah “Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing”. Penetapan visi tersebut ditetapkan secara selaras dengan visi Presiden terpilih dan selaras dengan visi BSKJI sesuai fungsi BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI. BBSPJPPI akan fokus serta senantiasa berupaya menjadi institusi yang profesional, terpercaya dengan didukung oleh unit layanan teknis sesuai kompetensi inti yang dimiliki BBSPJPPI maupun dengan berkolaborasi dengan pihak lain, mampu untuk menangani serta memenuhi kebutuhan industri di bidang standardisasi dan jasa industri yang sesuai dengan perkembangan regulasi maupun tuntutan pertumbuhan industri dalam upaya mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan industri berkelanjutan.

Misi

Misi BBSPJPPI adalah “Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau”. Berkenaan dengan misi BBSPJPPI di atas, BBSPJPPI akan berkontribusi dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi di sektor industri, secara mandiri maupun berkolaborasi mendorong penerapan dan pemanfaatan teknologi industri yang mendukung pada peningkatan produktivitas dan efisiensi, penerapan standar industri hijau, implementasi industri 4.0 yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kemandirian dan daya saing industri serta pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Tujuan

Tujuan BBSPJPPI yang selaras dengan pencapaian tujuan BSKJI, yaitu

1. Meningkatkan kemampuan infrastruktur (*hard* dan *soft*) penunjang pertumbuhan industri,
2. Meningkatkan kualitas pelayanan standardisasi dan jasa industri yang berperan pada pertumbuhan industri,
3. Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri
4. Meningkatkan *good governance*.

Pendekatan

Penyusunan

Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Akuntansi Instansi terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu sistem terintegrasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker untuk memproses seluruh transaksi di K/L, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, maupun pertanggungjawaban. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audit. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh beberapa modul yaitu

Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran

Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul

Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.

Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan

Pada modul GL dan Pelaporan menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan modul Aset Tetap dan modul Persediaan adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya

Basis Akuntansi

A.4. BASIS AKUNTANSI

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan

historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

*Tabel 7
Perhitungan Penyisihan Piutang*

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan

pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Implementasi Metode Penilaian Persediaan First in First out (FIFO)

Sejak penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual tahun 2015 hingga tahun 2020, Pemerintah menggunakan metode HPT dalam penilaian persediaan. Mulai Tahun Anggaran 2021, Pemerintah menerapkan metode penilaian persediaan FIFO sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin serta peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu juta rupiah);
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pemerintah melakukan penilaian Kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga Yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

Pada tahun 2019, atas penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan untuk penyempurnaan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.

Berdasarkan Surat Anggota BPK Nomor 50/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 Unaudited

sesuai mekanisme yang berlaku.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset
Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan

adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 266/KM.6/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum, tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	40 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 50 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Tabel 9
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri per 31 Desember 2025 telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 15 kali dari DIPA awal sebesar Rp36.159.131.000,00. Dari anggaran awal tersebut, terjadi perubahan postur anggaran pada belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal sehingga anggaran menjadi Rp40.465.963.000,00. Revisi diajukan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari DIPA tahun 2025. Revisi ini dilakukan guna mendukung kegiatan operasional Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri. Rincian perubahan berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja disajikan sebagai berikut.

Tabel 10
Rincian Perubahan DIPA

Uraian	2025	
	Anggaran Awal	Anggaran setelah direvisi
Penerimaan Negara Bukan Pajak	18.686.000.000,00	18.686.000.000,00
Jumlah Pendapatan	18.686.000.000,00	18.686.000.000,00
Belanja Pegawai	14.982.432.000,00	16.501.120.000,00
Belanja Barang	16.157.113.000,00	18.684.267.000,00
Belanja Modal	5.019.586.000,00	5.280.576.000,00
Jumlah Belanja	36.159.131.000,00	40.465.963.000,00

Seiring dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia. Pada tahun 2025, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri tidak memiliki anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19. Berikut rincian anggaran penanganan pandemi COVID-19 di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri.

Tabel 11
Rincian Anggaran Penanganan Pandemi COVID-19

No	Kode Satker	Pagu Anggaran				Total Pagu
		Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Bansos		
1	247161	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
Total		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-

Pada tahun 2025, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri juga tidak memiliki anggaran *tagging* Pemulihan

Ekonomi Nasional (PEN). Berikut rincian anggaran *tagging* Pemulihan Ekonomi Nasional.

Tabel 12
Rincian Anggaran Tagging Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

No	Akun	Alokasi Anggaran/DIPA	Realisasi (Kas)	Keterangan
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program PEN di Lingkungan Kementerian Perindustrian				
A. Menggunakan Akun Khusus Covid 19				
1				NIHIL
Total				
B. Tidak Menggunakan Akun Khusus Covid 19				
1				NIHIL
Total				

Adapun rincian revisi DIPA pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13
Revisi DIPA BBSPJPI

Revisi Ke-	Nomor Revisi DIPA	Tanggal Revisi	Pagu DIPA	Keterangan
1	SP DIPA-019.07.2.247161/2025	17 Januari 2025	36.159.131.000,00	Revisi dalam rangka pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan tanpa merubah pagu.
2	SP DIPA-019.07.2.247161/2025	21 Februari 2025	36.159.131.000,00	Revisi dalam rangka efisiensi anggaran BBSPJPI Tahun 2025. Nilai efisiensi belanja BBSPJPI TA 2025 sebagaimana ditetapkan dalam nota dinas BSKJI sebesar Rp 6.589.339.000. Pagu efektif BBSPJPI Tahun 2025 sebesar Rp 29.569.792.000. Revisi ini tanpa merubah pagu.
3	SP DIPA-019.07.2.247161/2025	03 Maret 2025	36.159.131.000,00	Revisi recomposisi revisi efisiensi anggaran. Pagu anggaran tidak mengalami perubahan.
4	SP DIPA-019.07.2.247161/2025	11 Maret 2025	36.159.131.000,00	Revisi pencantuman saldo awal. Besaran saldo awal BLU BBSPJPI TA 2025 sebesar Rp. 2.937.097.225,- sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe AI Semarang I Nomor KET-3/KPN. 1401/2025 tanggal 10 Februari 2025. Pagu anggaran pada revisi ini tidak mengalami perubahan.
5	SP DIPA-019.07.2.247161/2025	17 April 2025	36.159.131.000,00	Revisi pemutakhiran RPD Hal III DIPA. Untuk mendukung pencapaian kinerja IKPA yang optimal khususnya pada aspek perencanaan, telah dilakukan pengajuan revisi dalam rangka penyesuaian rencana penarikan dana pada halaman III DIPA pada satker BBSPJPI sd Triwulan III 2025. Revisi ini tanpa merubah pagu.
6	SP DIPA-019.07.2.247161/2025	27 Mei 2025	36.159.131.000,00	Revisi relaksasi Blokir Kode A. Besaran relaksasi blokir kode A sebesar Rp. 175.815.000,- yang ditujukan untuk kegiatan layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor). Relaksasi ini menyebabkan nilai efisiensi belanja yang semula Rp. 6.589.339.000,- menjadi sebesar Rp. 6.413.524.000,-, sehingga besaran pagu efektif BBSPJPI TA 2025 menjadi sebesar Rp. 29.745.607.000,-. Revisi ini tanpa merubah pagu.
7	SP DIPA-019.07.2.247161/2025	25 Juni 2025	36.159.131.000,00	Revisi dalam rangka pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan tanpa merubah pagu.
8	SP DIPA-019.07.2.247161/2025	07 Juli 2025	36.159.131.000,00	Revisi pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA Triwulan II tanpa merubah pagu anggaran.
9	SP DIPA-019.07.2.247161/2025	22 Agustus 2025	36.159.131.000,00	Revisi dalam rangka relaksasi blokir anggaran BBSPJPI Tahap II. Dimana BBSPJPI mendapatkan relaksasi blokir kode A tahap II sebesar Rp. 591.306.000,- yang ditujukan untuk kegiatan layanan kepada industri dan perjalanan dinas pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri. Pagu efektif anggaran menjadi Rp.30.336.913.000,-. Revisi ini tanpa merubah pagu.
10	SP DIPA-019.07.2.247161/2025	19 September 2025	38.947.275.000,00	Revisi dalam rangka penggunaan saldo awal kas BLU sebesar Rp.2.788.144.000,-. Revisi menyebabkan penambahan pagu anggaran pada DIPA BBSPJPI menjadi sebesar Rp. 38.947.275.000,-dengan nilai pagu efektif anggaran sebesar Rp. 33.125.057.000,-.
11	SP DIPA-019.07.2.247161/2025	01 Oktober 2025	38.947.275.000,00	Revisi terkait pemutakhiran KPA dimana mengakomodir potensi pagu minus belanja pegawai tanpa merubah pagu.
12	SP DIPA-019.07.2.247161/2025	03 Oktober 2025	38.947.275.000,00	Revisi dalam rangka pemutakhiran RPD hal III DIPA Triwulan IV tanpa merubah pagu anggaran.

Revisi Ke-	Nomor Revisi DIPA	Tanggal Revisi	Pagu DIPA	Keterangan
13	SP DIPA-019.07.2.247161/2025	10 November 2025	40.465.963.000,00	Revisi dalam rangka relaksasi blokir anggaran BBSPJPPI TA 2025 Tahap III berdasarkan Nota Dinas Kepala BSKJI Nomor 918/BSKJI/PR/X/2025 dimana mendapatkan relaksasi blokir sebesar Rp. 879.544.000,- yang terdiri dari RM sebesar Rp. 181.148.000,- (untuk listrik) di Program Dukungan Manajemen dan dari BLU sebesar Rp. 698.396.000,- (untuk sewa GCMS) di Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri. Revisi ini turut mengakomodir penambahan alokasi anggaran sebesar Rp.1.518.688.000,- yang dipergunakan untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai tahun 2025. Sehingga pagu BBSPJPPI mengalami perubahan dari semula Rp. 38.947.275.000,- menjadi Rp. 40.465.963.000,-.
14	SP DIPA-019.07.2.247161/2025	17 November 2025	40.465.963.000,00	Revisi dalam pergeseran antar KRO dalam satu satker, antar jenis belanja yang mengakibatkan penambahan volume RO secara total tanpa merubah pagu anggaran. Total pagu Rp 40.465.963.000,- dengan nilai pagu efektif anggaran sebesar Rp.35.523.289.000,-.
15	SP DIPA-019.07.2.247161/2025	12 Desember 2025	40.465.963.000,00	Revisi dalam rangka pemutakhiran POK Kewenangan KPA tanpa merubah pagu anggaran.

*Pendapatan Negara
dan Hibah
Rp20.537.608.928,00*

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah Rp20.537.608.928,00 atau mencapai 109,91 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp18.686.000.000,00. Pendapatan Negara dan Hibah Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri terdiri dari :

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum
2. Pendapatan dari Alokasi APBN
3. Pendapatan BLU Lainnya
4. Pendapatan Lain-lain
5. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan APBN, Iuran Badan Usaha

Realisasi pendapatan BBSPJPPI per 31 Desember 2025 lebih tinggi dari target anggaran. Hal tersebut terjadi karena pelaksanaan kegiatan operasional satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri telah berjalan dengan normal sejak berakhirnya pandemi covid. Selain itu adanya inovasi jasa layanan baru pada lingkup pengujian kalibrasi, meningkatnya minat industri pada jasa verifikasi TKDN dan uji profisiensi, serta adanya produksi alat AiMs dari BBSPJPPI yang mulai dipasarkan, juga membuat pendapatan BBSPJPPI melebihi target. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan PNB			
Pendapatan PNB lainnya	0,00	54.252.975,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0,00	30.060.972,00	0,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	0,00	24.192.003,00	0,00
Pendapatan Badan Layanan Umum	18.686.000.000,00	20.483.355.953,00	109,62
Pendapatan Jasa Layanan Umum	18.686.000.000,00	20.160.742.350,00	107,89
Pendapatan Dari Alokasi APBN	0,00	89.441.000,00	0,00
Pendapatan BLU Lainnya	0,00	233.172.603,00	0,00
Jumlah	18.686.000.000,00	20.537.608.928,00	109,91

Pada tahun 2025, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri memperoleh pendapatan PNB Lainnya sebesar Rp54.252.975.000,00 yang berasal dari:

1. Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp30.060.972,00 meliputi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp375,00 yang merupakan pembulatan kekurangan gaji dari 26 pegawai BBSPJPPI dan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp30.060.972,00 yang merupakan Pengembalian Biaya Perjalanan Dinas dengan sumber dana Rupiah Murni berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Ulang Tindak Lanjut BPK oleh Inspektorat Jenderal Nomor 08/IJ-IND.6/LHA/XII/2025.
2. Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha sebesar Rp24.192.003,00 meliputi Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp6.960.000,00 yang merupakan Pendapatan yang diterima dari sewa Rumah Dinas selama 12 bulan dengan biaya sewa perbulan sebesar Rp580.000,00 sesuai Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 3594 Tahun 2023 dan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp17.232.000,00 yang merupakan hasil lelang BMN yang dibayarkan tahun 2025 berdasarkan risalah lelang nomor 15/09.01/2024-01.

Pendapatan Badan Layanan Umum tahun 2025 sebesar Rp20.483.355.953,00 terdiri dari:

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar Rp 20.160.742.350,00 berasal dari 506 pelanggan jasa layanan pengujian, 53 pelanggan jasa layanan kalibrasi, 261 pelanggan jasa layanan sertifikasi, 26 pelanggan jasa layanan bimbingan dan pendampingan teknis (pelatihan), 37 pelanggan jasa layanan verifikasi TKDN, 50 pelanggan jasa layanan optimalisasi pemanfaatan teknologi, 49 pelanggan jasa layanan uji profisiensi, serta pelanggan dari penerimaan lainnya. Data tersebut diperoleh dari realisasi capaian output tahun 2025 yang rinciannya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.
2. Pendapatan BLU Lainnya sebesar Rp233.172.603,00 berasal dari Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU sebesar Rp100.198.014,00 yang merupakan jasa giro dari rekening BLU, Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL sebesar Rp76.724.589,00 yang merupakan Pengembalian Biaya Perjalanan Dinas dengan sumber dana BLU berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Ulang Tindak Lanjut BPK oleh Inspektorat Jenderal Nomor 08/IJ-IND.6/LHA/XII/2025, Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung sebesar Rp55.000.000,00, dan Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan sebesar Rp1.250.000,00.
3. Pendapatan dari Alokasi APBN sebesar Rp89.441.000,00 merupakan Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah dalam satu Kementerian/Lembaga.

*Tabel 15
Rincian Pendapatan Badan Layanan Umum
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

MAP	Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	20.160.742.350,00	18.047.202.663,00	2.113.539.687,00
424113	Penanganan Pencemaran	11.106.379.648,00	8.944.656.500,00	2.161.723.148,00
	Pengujian Bahan dan Barang	1.111.234.625,00	1.163.561.280,00	(52.326.655,00)
	Standarisasi Penguji Mutu Produk	1.522.227.400,00	1.741.672.300,00	(219.444.900,00)
	Kalibrasi	1.245.166.852,00	708.612.100,00	536.554.752,00
	Sertifikasi Sistem Mutu	2.506.060.000,00	2.120.860.000,00	385.200.000,00
	Sertifikasi Halal	38.070.000,00	184.145.799,00	(146.075.799,00)
	Pelatihan Teknik Operasional	184.587.100,00	1.990.754.200,00	(1.806.167.100,00)
	Konsultasi	163.190.000,00	148.780.000,00	14.410.000,00
	Rancang Bangun dan Rekayasa	932.943.500,00	489.747.775,00	443.195.725,00
	Verifikasi TKDN	1.237.909.000,00	470.743.400,00	767.165.600,00
	Penyelenggaraan Uji Profisiensi	110.639.192,00	51.094.200,00	59.544.992,00
	Penerimaan Lainnya	2.335.033,00	32.575.109,00	(30.240.076,00)
4244	Pendapatan Dari Alokasi APBN	89.441.000,00	306.257.490,00	(216.816.490,00)
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah	89.441.000,00	306.257.490,00	(216.816.490,00)
4249	Pendapatan BLU Lainnya	233.172.603,00	64.810.470,00	168.362.133,00
424911	Pendapatan Layanan Perbankan BLU	100.198.014,00	64.810.470,00	35.387.544,00
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL	76.724.589,00	0,00	76.724.589,00
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
	Jumlah	20.483.355.953,00	18.418.270.623,00	2.065.085.330,00

Tabel 16
**Rincian Pendapatan Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah
per 31 Desember 2025**

NAMA SATKER	NO SPM	NO SP2B BLU	TANGGAL SP2B BLU	NILAI
Balai Besar Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Selulosa	00053A	250263302000004	26/03/2025	1.560.000,00
Balai Besar Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Selulosa	00053A	250263302000004	26/03/2025	990.000,00
Laboratorium Pengujian Kimia Lingkungan BBSPJIT	00068A	250260000000007	28/04/2025	5.000.000,00
Laboratorium Penguji BSPJI Banda Aceh	00087A	250260000000010	27/05/2025	573.000,00
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru	00117A	250260000000013	30/06/2025	12.150.000,00
Lab Pengujian BSPJI Palembang	00117A	250260000000013	30/06/2025	2.750.000,00
Balai Besar Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Selulosa	00117A	250260000000013	30/06/2025	2.750.000,00
Balai Besar Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Selulosa	00139A	250260000000017	06/08/2025	330.000,00
Laboratorium Penguji BSPJI Banda Aceh	00139A	250260000000017	06/08/2025	6.000.000,00
Laboratorium Penguji BSPJI Banda Aceh	00139A	250260000000017	06/08/2025	4.400.000,00
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado	00184A	250260000000023	26/09/2025	9.700.000,00
Balai Besar Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Selulosa	00199A	250260000000027	23/10/2025	330.000,00
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado	00199A	250260000000027	23/10/2025	1.900.000,00
Balai Besar Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Selulosa	00222A	250260000000033	27/11/2025	450.000,00
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim	00222A	250260000000033	27/11/2025	1.750.000,00
PPK PIHa Kemenperin	00222A	250260000000033	27/11/2025	38.478.000,00
Balai Besar Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Selulosa	00243A	250260000000037	18/12/2025	330.000,00
				89.441.000,00

Realisasi pendapatan per 31 Desember 2025 naik sebesar 11,16 persen dari realisasi pendapatan per 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh:

1. Naiknya pendapatan PNPB Lainnya pada tahun 2025 karena adanya beberapa penerimaan di tahun 2025 yang tidak ada di tahun 2024 seperti penerimaan dari hasil lelang BMN dan penerimaan kembali belanja belanja barang TAYL.
2. Naiknya pendapatan BLU pada tahun 2025 karena adanya inovasi jasa layanan baru pada lingkup pengujian kalibrasi, meningkatnya minat industri pada jasa verifikasi TKDN dan uji profisiensi, serta adanya produksi alat AiMs dari BBSPJPPI yang mulai dipasarkan.

Rincian perbandingan realisasi pendapatan disajikan sebagai berikut.

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Pendapatan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
1. Pendapatan PNPB lainnya	54.252.975,00	57.405.000,00	(5,49)
2. Pendapatan Badan Layanan Umum	20.483.355.953,00	18.418.270.623,00	11,21
Jumlah Pendapatan	20.537.608.928,00	18.475.675.623,00	11,16

Realisasi Belanja
Negara
Rp35.173.183.417,00

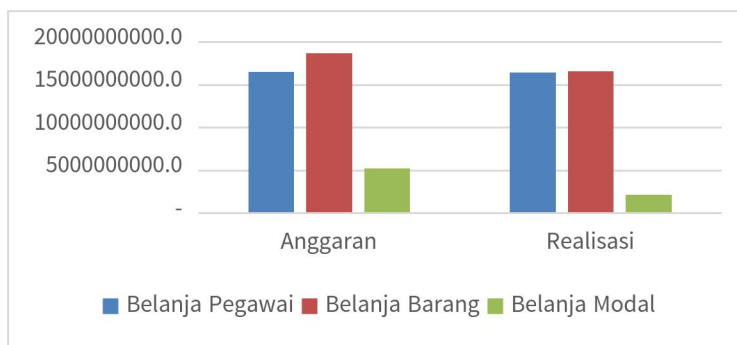
B.2. Belanja

Realisasi belanja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri pada tahun 2025 adalah sebesar Rp35.173.183.417,00 atau 86,92 persen dari anggaran belanja senilai Rp40.465.963.000,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 18
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	16.501.120.000,00	16.414.389.576,00	99,47
Belanja Barang	18.684.267.000,00	16.569.981.938,00	88,68
Belanja Modal	5.280.576.000,00	2.192.848.012,00	41,53
Total Belanja Kotor	40.465.963.000,00	35.177.219.526,00	86,93
Pengembalian Belanja	0,00	4.036.109,00	0,00
Belanja Netto	40.465.963.000,00	35.173.183.417,00	86,92

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada grafik berikut.



Realisasi belanja (bersih) per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar **(15,47)** persen dibandingkan realisasi belanja per 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh turunnya realisasi belanja barang dan belanja modal pada tahun 2025 karena adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Efisiensi dan optimalisasi tersebut mengurangi anggaran belanja sehingga Satker belum dapat merealisasikan belanja barang dan belanja modal yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu pada tahun 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja untuk Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) seperti pada tahun 2024. Rincian perbandingan realisasi belanja (bersih) disajikan sebagai berikut.

Tabel 19
Perbandingan Realisasi Belanja
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	16.410.353.467,00	14.880.867.879,00	10,28
Belanja Barang	16.569.981.938,00	17.082.357.266,00	(3,00)
Belanja Modal	2.192.848.012,00	9.645.427.581,00	(77,27)
Jumlah Belanja	35.173.183.417,00	41.608.652.726,00	(15,47)

Belanja Pegawai
Rp16.410.353.467,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri per 31 Desember 2025 meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada gaji PNS dan PPPK; Belanja Tunjangan Kinerja PNS dan PPPK; Belanja Uang Makan PNS dan PPPK; serta Belanja Uang Lembur PNS. Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp16.410.353.467,00 dan Rp14.880.867.879,00. Realisasi belanja tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 10,28 persen dari realisasi belanja tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh:

1. Naiknya belanja gaji dan tunjangan PNS karena adanya pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji untuk 11 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai bulan Juni 2025, selain itu terdapat

- beberapa pegawai yang mengalami perpindahan dari pelaksana ke fungsional.
2. Naiknya gaji dan tunjangan PPPK karena adanya pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji untuk 16 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai bulan Oktober 2025.

Tabel 20
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	Naik/ (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7.704.548.573,00	7.281.735.990,00	5,81
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	350.673.056,00	182.624.220,00	92,02
Belanja Lembur	49.836.000,00	70.755.000,00	(29,57)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai	8.309.331.947,00	7.347.236.510,00	13,09
Jumlah Belanja Kotor	16.414.389.576,00	14.882.351.720,00	10,29
Pengembalian Belanja Pegawai	(4.036.109,00)	(1.483.841,00)	172,00
Jumlah Belanja Bersih	16.410.353.467,00	14.880.867.879,00	10,28

Pengembalian Belanja Pegawai sebesar (Rp4.036.109,00) terdiri dari:

1. Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS (Rp1.109,00).
2. Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Rp390.000,00).
3. Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS (Rp3.645.000,00).

*Belanja Barang dan
Jasa*
Rp16.569.981.938,00

B.4 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp16.569.981.938,00 dan Rp17.082.357.266,00. Realisasi belanja barang pada tahun 2025 meliputi belanja barang operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja barang BLU. Belanja barang Badan Layanan Umum meliputi belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, belanja barang persediaan barang konsumsi-BLU, belanja barang persediaan pemeliharaan-BLU, belanja barang persediaan bahan baku untuk proses produksi, belanja jasa BLU kepada BLU lain dalam satu Kementerian, serta belanja peralatan dan mesin-ekstrakomptabel BLU. Rincian perbandingan belanja barang disajikan sebagai berikut.

Tabel 21
Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A 2025	REALISASI T.A 2024	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	94.356.728,00	501.782.506,00	(81,20)
Belanja Barang Non Operasional	0,00	104.006.687,00	(100,00)
Belanja Barang Persediaan	0,00	73.063.780,00	(100,00)
Belanja Jasa	277.103.174,00	1.716.191.571,00	(83,85)
Belanja Pemeliharaan	553.309.462,00	1.234.188.406,00	(55,17)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	0,00	785.782.347,00	(100,00)
Belanja Barang Badan Layanan Umum	15.645.212.574,00	12.667.341.969,00	23,51
Jumlah Belanja Kotor	16.569.981.938,00	17.082.357.266,00	(3,00)
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Bersih	16.569.981.938,00	17.082.357.266,00	(3,00)

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (3,00) persen dari realisasi belanja barang per 31 Desember 2024. Penurunan belanja barang terjadi karena adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Efisiensi dan optimalisasi tersebut mengurangi anggaran belanja barang, sehingga Satker belum dapat merealisasikan belanja barang khususnya yang menggunkan sumber dana Rupiah Murni. Selain itu pada tahun 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja barang untuk DAPATI seperti pada tahun 2024.

Tabel 22
Rincian Belanja Barang Badan Layanan Umum
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi 31 Desember 2025	Realisasi 31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Belanja Barang Badan Layanan Umum			
Belanja Barang	1.111.318.440,00	1.354.984.517,00	(243.666.077,00)
Belanja Jasa	5.152.989.270,00	3.283.301.529,00	1.869.687.741,00
Belanja Pemeliharaan	777.293.530,00	364.336.713,00	412.956.817,00
Belanja Perjalanan	3.106.703.281,00	3.835.198.882,00	(728.495.601,00)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-BLU	2.996.403.164,00	1.848.769.661,00	1.147.633.503,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	494.566.229,00	703.880.067,00	(209.313.838,00)
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi	374.387.460,00	179.830.000,00	194.557.460,00
Belanja Jasa BLU dalam Satu Kementerian	1.602.464.000,00	1.093.155.600,00	509.308.400,00
Belanja Gedung dan Bangunan-Ekstrakomptabel BLU	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	29.087.200,00	3.885.000,00	25.202.200,00
Belanja Aset Tetap Lainnya-Ekstrakomptabel BLU	0,00	0,00	0,00
Jumlah	15.645.212.574,00	12.667.341.969,00	2.977.870.605,00

Belanja jasa BLU dalam satu Kementerian per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.602.464.000,00, jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp1.093.155.600,00. Hal ini disebabkan oleh adanya belanja sewa peralatan *Gas Chromatography Mass Spectroscopy* (GCMS) dari Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) Bahan dan Barang Teknik yang pada tahun 2025 senilai Rp1.567.829.000,00. Rincian belanja jasa BLU dalam satu Kementerian disajikan sebagai berikut.

Tabel 23
Rincian Belanja Jasa BLU dalam Satu Kementerian per 31 Desember 2025

NAMA SATKER	NO SPM	NO SP2B BLU	TANGGAL SP2B BLU	NILAI
BBSPJI Bahan dan Barang Teknik	00053A	250263302000004	26/03/2025	339.000.000,00
BBSPJ Industri Agro	00053A	250263302000004	26/03/2025	1.225.000,00
BBSPJ Industri Agro	00053A	250263302000004	26/03/2025	425.000,00
BBSPJ Industri Agro	00053A	250263302000004	26/03/2025	3.225.000,00
BBSPJ Industri Agro	00053A	250263302000004	26/03/2025	2.025.000,00
BBSPJ Industri Kulit, Karet, Dan Plastik	00088A	250263302000012	27/05/2025	3.550.000,00
BBSPJ Industri Agro	00097A	250263302000015	28/05/2025	5.200.000,00
BBSPJ Industri Agro	00097A	250263302000015	28/05/2025	1.225.000,00
BBSPJ Industri Agro	00185A	259993324500018	26/09/2025	1.110.000,00
BBSPJI Bahan dan Barang Teknik	00185A	259993324500018	26/09/2025	318.604.000,00
BBSPJI Bahan dan Barang Teknik	00223A	259993324500027	28/11/2025	339.000.000,00
BBSPJI Bahan dan Barang Teknik	00223A	259993324500027	28/11/2025	359.396.000,00
BBSPJI Bahan dan Barang Teknik	00250A	259993324500038	29/12/2025	211.829.000,00
BBSPJI Bahan dan Barang Teknik	00267A	250260000001101	31/12/2025	8.400.000,00
BBSPJI Bahan dan Barang Teknik	00267A	250260000001101	31/12/2025	8.250.000,00
TOTAL				1.602.464.000,00

Belanja Modal

Rp2.192.848.012,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi belanja modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp2.192.848.012,00 dan Rp9.645.427.581,00. Realisasi belanja modal pada tahun 2025 meliputi belanja modal BLU berupa belanja modal peralatan dan mesin-BLU. Realisasi belanja modal tahun 2025 mengalami penurunan sebesar **(77,27)** persen dibandingkan realisasi belanja modal tahun 2024. Penurunan belanja modal terjadi karena adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Efisiensi dan

optimalisasi tersebut mengurangi anggaran belanja modal sehingga Satker belum dapat merealisasikan belanja modal yang telah direncanakan sebelumnya.

Tabel 24
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	Naik (Turun)
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	2.932.712.500,00	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Badan Layanan Umum	2.192.848.012,00	6.712.715.081,00	(67,33)
Belanja Modal Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	2.192.848.012,00	6.502.571.870,00	(66,28)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya - BLU	0,00	210.143.211,00	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	2.192.848.012,00	9.645.427.581,00	(77,27)
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Bersih	2.192.848.012,00	9.645.427.581,00	(77,27)

Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal tanah tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi tahun 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan realisasi tahun 2024.

Tabel 25
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 dan 2024

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp2.932.712.500,00. Realisasi tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2024. Penurunan belanja modal peralatan dan mesin terjadi karena adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Efisiensi dan optimalisasi tersebut menghilangkan anggaran belanja modal peralatan dan mesin dengan sumber dana Rupiah Murni sehingga Satker belum dapat merealisasikan belanja tersebut.

Tabel 26
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2025 dan 2024

Uraian Jenis Belanja	Realisasi T.A. 2025	Realisasi T.A. 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	2.932.712.500,00	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	0,00	2.932.712.500,00	(100,00)
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0,00	2.932.712.500,00	(100,00)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi tahun 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan tahun 2024.

Tabel 27
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun 2025 dan 2024

Uraian Jenis Belanja	Realisasi T.A. 2025	Realisasi T.A. 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi tahun 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan tahun 2024.

Tabel 28
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Tahun 2025 dan 2024

Uraian Jenis Belanja	Realisasi T.A. 2025	Realisasi T.A. 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal Lainnya

Realisasi belanja modal lainnya tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi tahun 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan tahun 2024.

Tabel 29
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2025 dan 2024

Uraian Jenis Belanja	Realisasi T.A. 2025	Realisasi T.A. 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal BLU

Realisasi belanja modal BLU tahun 2025 dan 2024 masing-masing adalah

Rp2.192.848.012,00 dan Rp6.712.715.081,00. Realisasi tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Penurunan belanja modal BLU terjadi karena adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Efisiensi dan optimalisasi tersebut mengurangi anggaran belanja modal BLU tahun 2025, sehingga Satker belum dapat merealisasikan seluruh belanja yang telah direncanakan sebelumnya.

*Tabel 30
Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU Tahun 2025 dan 2024*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi T.A. 2025	Realisasi T.A. 2025	Naik (Turun) %
Belanja Modal BLU	2.192.848.012,00	6.712.715.081,00	(67,33)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU	2.192.848.012,00	6.502.571.870,00	(66,28)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya-BLU	0,00	210.143.211,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	2.192.848.012,00	6.712.715.081,00	(67,33)
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Bersih	2.192.848.012,00	6.712.715.081,00	(67,33)

Belanja modal BLU tahun 2025 sebesar Rp2.192.848.012,00 terdiri dari:

1. Belanja modal BLU sebesar Rp450.000.000,00 berupa pengadaan 1 unit *Portable High Performance Zero Air System* sesuai Surat Pesanan Nomor 93/BBSPJPPI/PBJ/III/2025 tanggal 7 Maret 2025.
2. Belanja modal BLU sebesar Rp950.000.000,00 berupa pengadaan 1 unit *Portable Gas Calibrator* sesuai Surat Pesanan Nomor 94/BBSPJPPI/PBJ/III/2025 tanggal 7 Maret 2025.
3. Belanja modal BLU sebesar Rp106.317.576,00 berupa pengadaan 6 unit meja kubikal isi 4 sesuai SPK Nomor 184a/BBSPJPPI/PBJ/V/2025 tanggal 8 Mei 2025.
4. Belanja modal BLU sebesar Rp37.470.000,00 berupa pengadaan 5 unit AC Panasonic sesuai invoice nomor SAW/2506/0536 tanggal 3 Juni 2025.
5. Belanja modal BLU sebesar Rp15.784.200,00 berupa pengadaan 2 set Smart TV 43 Inch sesuai kuitansi nomor 03/KKPRI/USBER-KWT/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025.
6. Belanja modal BLU sebesar Rp8.269.500,00 berupa pengadaan 1 set Smart TV 55 Inch sesuai kuitansi nomor 02/KKPRI/USBER-KWT/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025.

7. Belanja modal BLU sebesar Rp5.355.000,00 berupa pengadaan 1 unit AC Panasonic CS-PN9WKJ sesuai invoice nomor SAJ/2507/17725 tanggal 23 Juli 2025.
8. Belanja modal BLU sebesar Rp10.995.438,00 berupa pengadaan 1 unit Hanna Instruments HI 8424 portable sesuai kuitansi nomor 07/KKPRI-USBK/KWT/LK/VIII/2025 tanggal 21 Agustus 2025.
9. Belanja modal BLU sebesar Rp25.729.800,00 berupa pengadaan 1 unit pH Hanna Instruments HI-5221 benchtop sesuai kuitansi Nomor 06/KKPRI-USBK/KWT/LK/VIII/2025 tanggal 21 Agustus 2025.
10. Belanja modal BLU sebesar Rp130.000.000,00 berupa pengadaan 1 unit Incubator BOD sesuai Surat Pesanan Nomor EP-01K0NQYMWDN5C0NNTJX66P7E0W tanggal 23 Juli 2025.
11. Belanja modal BLU sebesar Rp2.886.000,00 berupa pengadaan 2 unit Heating Mantle 500ml Joanlab HM Electric Lab Mixer Stirrer Laboratory 500ml sesuai kuitansi nomor 12/KKPRI-USBK/KWT/LK/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025.
12. Belanja modal BLU sebesar Rp42.180.000,00 berupa pengadaan 2 unit Current Meter Flowatch FL-03 sesuai kuitansi nomor 13/KKPRI-USBK/KWT/LK/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025.
13. Belanja modal BLU sebesar Rp10.545.000,00 berupa pengadaan 1 unit Centrifuge Gemmy PLC-03 sesuai kuitansi nomor 17/KKPRI-USBK/KWT/LK/XI/2025 tanggal 25 November 2025.
14. Belanja modal BLU sebesar Rp29.970.000,00 berupa pengadaan 1 unit Biobase Multi Position Hotplate Magnetic Stirrer MS-H280-S6 sesuai kuitansi nomor 18/KKPRI-USBK/KWT/LK/XI/2025 tanggal 25 November 2025.
15. Belanja modal BLU sebesar Rp4.845.150,00 berupa pengadaan 1 unit Controller dan Probe PH ORP Kedida Meter Water Controller Tester CT-6659 sesuai kuitansi nomor 26/KKPRI-USBK/KWT/LK/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025.
16. Belanja modal BLU sebesar Rp60.372.900,00 berupa pengadaan 1 unit Flow Chart Recorder 24 Hours Tisch Environment TE5009-X sesuai kuitansi nomor 27/KKPRI-USBK/KWT/LK/XII/2025 tanggal 16

Desember 2025.

17. Belanja modal BLU sebesar Rp30.279.690,00 berupa pengadaan 2 unit Showcase Polytron SCN 1020 sesuai kuitansi nomor 28/KKPRI-USBK/KWT/LK/XII/2025 tanggal 16 Desember 2025.
18. Belanja modal BLU sebesar Rp3.487.620,00 berupa pembelian 1 unit kursi kerja kantor sesuai invoice nomor 8864069T251119150349 tanggal 19 November 2025.
19. Belanja modal BLU sebesar Rp1.108.000,00 berupa pembelian 1 unit kursi kantor hitam sesuai invoice nomor 8899354T251216115139 tanggal 16 Desember 2025.
20. Belanja modal BLU sebesar Rp25.263.600,00 berupa pembelian 1 unit full polypropylene corrosive cabinet sesuai kuitansi nomor 089/KW2025 tanggal 19 Desember 2025.
21. Belanja modal BLU sebesar Rp32.190.000,00 berupa pembelian 1 unit anti vibration bench sesuai kuitansi nomor 090/KW/2025 tanggal 19 Desember 2025.
22. Belanja modal BLU sebesar Rp28.000.000,00 berupa pembelian 1 unit anti vibration bench sesuai invoice nomor INV-2025120007 tanggal 19 Desember 2025.
23. Belanja modal BLU sebesar Rp153.500.000,00 berupa pengadaan 1 unit Lemari Asam sesuai Surat Pesanan Nomor EP-01KBPTJJYN7S23GJ1NWXFASA2 tanggal 8 Desember 2025.
24. Belanja modal BLU sebesar Rp16.998.540,00 berupa pembelian 2 unit horizontal water sampler sesuai Surat Pesanan Nomor 622/BBSPJPPI/PBJ/XI/2025 tanggal 17 Desember 2025.
25. Belanja modal BLU sebesar Rp5.999.998,00 berupa pembelian 2 unit surber stream sesuai kuitansi nomor 078/KWT-TES/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025.
26. Belanja modal BLU sebesar Rp5.300.000,00 berupa pembelian 2 unit well/grab sampler sesuai Surat pesanan Nomor 622/BBSPJPPI/PBJ/XI/2025 tanggal 17 Desember 2025.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar
Rp7.695.261.780,00

C.1. Aset Lancar

Saldo Aset Lancar BBSPJPPI per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp7.695.261.780,00 dan Rp5.809.042.865,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar BBSPJPPI tahun 2025 meliputi kas pada BLU, belanja dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, piutang bukan pajak, piutang dari kegiatan operasional BLU, dan persediaan. Aset lancar tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024, hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi dan optimisasi anggaran yang mengakibatkan beberapa anggaran belanja tidak dapat direalisasikan sehingga saldo akhir yang menjadi kas pada BLU per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut juga didukung oleh penerimaan BBSPJPPI tahun 2025 yang melebihi target.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan sebagai berikut.

Tabel 31
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Keterangan	T.A. 2025	T.A. 2024
1	Bank Mandiri VA 8100122471611000	0,00	0,00
2	Bank BNI 0612318724	0,00	0,00
3	Uang Tunai di Brankas	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,00

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di

Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan disajikan sebagai berikut.

*Tabel 32
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

No	Keterangan	T.A. 2025	T.A. 2024
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0,00*

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp0,00. dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan sebagai berikut.

*Tabel 33
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

No	Keterangan	T.A. 2025	T.A. 2024
1	Kas Lainnya di Bendahara pengeluaran	0,00	0,00
2	Kas Lainnya di Bendahara penerimaan	0,00	0,00
3	Kas Lainnya di BLU	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

*Kas pada Badan
Layanan Umum
Rp5.582.392.592,00*

C.1.4. Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp5.582.392.592,00 dan Rp2.937.097.225,00 yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara yang sumbernya berasal dari kegiatan operasional Badan Layanan Umum. Saldo kas ini mencerminkan saldo dari pengesahan

Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum melalui mekanisme SP3B BLU. Rincian Kas pada Badan Layanan Umum disajikan sebagai berikut.

Tabel 34
Rincian Kas pada Badan Layanan Umum
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

NO	NAMA REKENING	T.A. 2025	T.A. 2024
1	BANK BPD JATENG 1034-09607-7	0,00	21.407.980,00
2	BANK BNI 0031398005	464.655.053,00	109.182.020,00
3	BANK BNI 0212338029	5.117.737.539,00	2.806.507.225,00
4	BANK BNI 0612318724	0,00	0,00
5	Uang Muka Operasional	0,00	0,00
Jumlah		5.582.392.592,00	2.937.097.225,00

Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum melalui mekanisme SP3B BLU sebesar Rp5.582.392.592,00, sedangkan pendapatan yang belum disahkan sebesar Rp0,00 dan belanja yang belum disahkan sebesar Rp0,00.

*Piutang Pendapatan
Negara Bukan Pajak
Rp115.000,00*

C.1.5. Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak

Saldo Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp115.000,00 dan Rp0,00. Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak disajikan sebagai berikut.

Tabel 35
Rincian Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Keterangan	T.A. 2025	T.A. 2024
1	Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak	115.000,00	0,00
Jumlah		115.000,00	0,00

*Piutang dari Kegiatan
Operasional Badan
Layanan Umum
Rp8.145.000,00*

C.1.6. Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Saldo Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp8.145.000,00 dan Rp16.745.000,00. Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum

diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca. Realisasi piutang per 31 Desember 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan piutang per 31 Desember 2024. Hal ini terjadi karena banyaknya perusahaan yang melakukan pembayaran secara tepat waktu atau ketika belum jatuh tempo. Rincian Piutang disajikan sebagai berikut.

Tabel 36
Rincian Piutang Operasional
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah Debitur T.A. 2025	T.A. 2025	Jumlah Debitur T.A. 2024	T.A. 2024	Naik (Turun)
Piutang Operasional BLU	1 Perusahaan	8.145.000,00	2 Perusahaan	16.745.000,00	(8.600.000,00)
Piutang Lainnya	-	0,00	-	0,00	0,00
Jumlah		8.145.000,00		16.745.000,00	(8.600.000,00)

Pada tahun anggaran 2025 Piutang dari kegiatan Operasional BLU sebesar Rp8.145.000,00 yang terdiri dari piutang milik PT Tekstil Industri Palekat.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang dari Kegiatan
Operasional BLU
(Rp8.145.000,00)*

C.1.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Nilai Penyisihan piutang tak tertagih – piutang dari kegiatan operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah (Rp8.14.5000,00) dan (Rp666.550,00). Penyisihan piutang tak tertagih – piutang dari kegiatan operasional BLU merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing debitur. Rincian estimasi penyisihan tak tertagih – kegiatan operasional BLU disajikan sebagai berikut.

Tabel 37
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025

No.	Kualitas Piutang	Jumlah T.A. 2025	%	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1	Lancar	0,00	5,00	0,00
2	Kurang Lancar	0,00	10,00	0,00
3	Diragukan	0,00	50,00	0,00
4	Macet	8.145.000,00	100,00	8.145.000,00
Jumlah		8.145.000,00		8.145.000,00

Penyisihan piutang tidak tertagih-piutang dari kegiatan operasional BLU per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan

oleh seluruh piutang yang di kategorikan sebagai piutang macet, sehingga penyisihan piutang terhitung sebesar 100 persen dari jumlah piutang pada tahun 2025, berbeda dengan tahun 2024 yang tidak terdapat piutang dengan kategori macet.

*Belanja Dibayar di
Muka Rp1.666.203,00*

C.1.8. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp1.666.203,00 dan Rp481.000,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hal yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang/jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka disajikan sebagai berikut.

*Tabel 38
Rincian Belanja Dibayar di Muka
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

No	Jenis	T.A. 2025	T.A. 2024
1	Pembayaran Internet	0,00	0,00
2	Pembayaran Google Drive	1.666.203,00	481.000,00
3	Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
4	Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0,00	0,00
Jumlah		1.666.203,00	481.000,00

Pada tahun 2025, BBSPJPPI melakukan pembayaran untuk langganan penyimpanan google drive 100GB pada 3 email dan 2 TB pada 1 email yang belum diterima manfaatnya. Langganan penyimpanan google drive tersebut sesuai dengan kebutuhan Satker untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pelanggan. Langganan penyimpanan pada 4 email menghasilkan belanja barang dibayar di muka berturut-turut sebesar Rp177.600,00, Rp1.022.403,00, Rp199.800,00, dan Rp266.400,00.

*Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp1.890.405.440,00*

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp1.890.405.440,00 dan Rp2.534.139.400,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan pendapatan yang seharusnya telah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke Kas Negara. Rincian

Pendapatan yang Masih Harus Diterima disajikan sebagai berikut.

*Tabel 39
Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

No	Jenis	T.A. 2025	T.A. 2024
1	Pendapatan Bunga Deposito	0,00	0,00
2	Pendapatan Jasa Layanan	1.890.405.440,00	2.534.139.400,00
Jumlah		1.890.405.440,00	2.534.139.400,00

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.890.405.440,00 merupakan pendapatan yang belum diterbitkan surat tagihannya kepada wajib bayar karena belum memenuhi batas waktu 1,5 bulan setelah sertifikat terbit, antara lain tagihan sebesar Rp346.920.000,00 pada PT PLN Nusantara Power Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya, Rp352.805.000,00 pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Pulang Pisau, Rp1.175.680.440,00 pada PT Kilang Pertamina International (KPI) RU IV Cilacap, dan Rp15.000.000,00 pada PTPN I Regional 3.

Persediaan

Rp220.682.545,00

C.1.10. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp220.682.545,00 dan Rp321.246.790,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan disajikan sebagai berikut.

*Tabel 40
Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

No	Persediaan	T.A 2025	T.A 2024
1	Barang Konsumsi	20.375.038,00	40.410.828,00
2	Barang untuk Pemeliharaan	166.482.479,00	12.500,00
3	Suku Cadang	13.726.948,00	57.761.192,00
4	Bahan Baku	20.098.080,00	2.693.419,00
5	Persediaan Lainnya	0,00	0,00
6	Persediaan Dalam Proses	0,00	220.368.851,00
Jumlah		220.682.545,00	321.246.790,00

Persediaan BBSPJPPI per 31 Desember 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini karena pada tahun 2025 pekerjaan yang menghasilkan persediaan dalam proses telah selesai

dilakukan sehingga tidak terdapat persediaan dalam proses.

Tabel 41
Rincian Mutasi Persediaan

Uraian	Saldo Awal sd 31 Desember 2024	Mutasi		Saldo Awal sd 31 Desember 2025
		Tambah	Kurang	
Barang Konsumsi	40.410.828,00	104.078.116,00	124.113.906,00	20.375.038,00
Bahan untuk Pemeliharaan	12.500,00	220.310.172,00	53.840.193,00	166.482.479,00
Suku Cadangan	57.761.192,00	2.022.450.182,00	2.066.484.426,00	13.726.948,00
Bahan Baku	2.693.419,00	1.457.922.556,00	1.440.517.895,00	20.098.080,00
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00	594.756.311,00	594.756.311,00	0,00
Persediaan Dalam Proses	220.368.851,00	374.387.460,00	594.756.311,00	0,00
Persediaan Lainnya	0,00	15.117.655,00	15.117.655,00	0,00
JUMLAH	321.246.790,00	4.789.022.452,00	4.889.586.697,00	220.682.545,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai pada Berita Acara Stok Opname Barang Persediaan No. 126/BBSPJPI/BMN/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

Aset Tetap
Rp127.393.552.450,00

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp127.393.552.450,00 dan Rp128.379.012.549,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp100.566.767.000,00

C.2.1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp100.566.767.000,00 dan Rp100.566.767.000,00. Rincian mutasi tanah per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 42
Rincian Mutasi Tanah

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2024	100.566.767.000,00
Mutasi tambah:	0,00
Pembelian	0,00
Selisih Revaluasi Aset	0,00
Reklasifikasi	0,00
Mutasi Kurang:	0,00
Penghentian Aset dari Penggunaan	0,00
Penghapusan	0,00
Saldo Per 31 Desember 2025	100.566.767.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0,00
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	100.566.767.000,00

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 43
Rincian Saldo Tanah

No	KIB	Luas	T.A 2025	Keterangan
1	1	450 m2	2.427.737.000,00	Rumah dinas Jl Trunojoyo x/13
2	2	3637 m2	97.545.072.000,00	Gedung Kantor
3	1	578 m2	225.579.000,00	Tanah di Muktiharjo
4	1	183 m2	368.379.000,00	Ruko di Jl Supriyadi Pedurungan
Jumlah			100.566.767.000,00	

Peralatan dan Mesin
Rp57.703.088.944,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp57.703.088.944,00 dan Rp57.168.492.456,00. Rincian mutasi nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 44
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo per 31 Desember 2024	57.168.492.456,00
Mutasi Tambah:	2.387.804.672,00
Saldo awal	0,00
Pembelian	2.193.848.012,00
Transfer Masuk	72.000.000,00
Koreksi Pembelian	0,00
Reklasifikasi Masuk	72.000.000,00
Perolehan Lainnya	49.956.660,00
Mutasi Kurang:	(1.853.208.184,00)
Penghentian aset dari penggunaan	(356.190.184,00)
Pencatatan barang yang mau dihapuskan	0,00
Penghapusan aset ekstrakomptabel	0,00
Transfer Keluar	(1.425.018.000,00)
Reklasifikasi Keluar	(72.000.000,00)
Saldo per 31 Desember 2025	57.703.088.944,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(44.273.741.607,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	13.429.347.337,00

Selisih Neraca vs LRA

Terkait rincian Neraca vs LRA, transaksi pembelian Peralatan dan Mesin di Neraca tercatat sebesar Rp2.193.848.012,00 sedangkan Belanja Modal pada LRA tercatat sebesar Rp2.192.848.012,00 yang menunjukkan selisih antara Neraca dan LRA sebesar Rp1.000.000,00. Selisih tersebut merupakan pembelian 1 unit meja pop up senilai Rp1.000.000,00 yang diakui sebagai belanja barang ekstrakomtabel namun seharusnya diakui/dicatatkan sebagai belanja modal peralatan dan mesin, sehingga menjadi penambah pada jumlah pembelian Peralatan dan Mesin di Neraca.

Mutasi tambah dan kurang dari peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

1. Pembelian peralatan dan mesin senilai Rp2.193.848.012,00 dengan rincian:
 - 1) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp450.000.000,00 berupa pengadaan 1 unit *Portable High Performance Zero Air System* sesuai Surat Pesanan Nomor 93/BBSPJPPI/PBJ/III/2025 tanggal 7 Maret 2025.
 - 2) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp950.000.000,00 berupa pengadaan 1 unit *Portable Gas Calibrator* sesuai Surat Pesanan Nomor 94/BBSPJPPI/PBJ/III/2025 tanggal 7 Maret 2025.
 - 3) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp106.317.576,00 berupa pengadaan 6 unit meja kubikal isi 4 sesuai SPK Nomor 184a/BBSPJPPI/PBJ/V/2025 tanggal 8 Mei 2025.
 - 4) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp37.470.000,00 berupa pengadaan 5 unit AC Panasonic sesuai invoice nomor SAW/2506/0536 tanggal 3 Juni 2025.
 - 5) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp15.784.200,00 berupa pengadaan 2 set Smart TV 43 Inch sesuai kuitansi nomor 03/KKPRI/USBER-KWT/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025.
 - 6) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp8.269.500,00 berupa pengadaan 1 set Smart TV 55 Inch sebanyak sesuai kuitansi nomor 02/KKPRI/USBER-KWT/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025.

- 7) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp5.355.000,00 berupa pengadaan 1 unit AC Panasonic CS-PN9WKJ sesuai invoice nomor SAJ/2507/17725 tanggal 23 Juli 2025.
- 8) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp10.995.438,00 berupa pengadaan 1 unit Hanna Instruments HI 8424 portable sesuai kuitansi Nomor 07/KKPRI-USBK/KWT/LK/VIII/2025 tanggal 21 Agustus 2025.
- 9) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp25.729.800,00 berupa pengadaan 1 unit pH Hanna Instruments HI-5221 benchtop sesuai kuitansi nomor 06/KKPRI-USBK/KWT/LK/VIII/2025 tanggal 21 Agustus 2025.
- 10) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp130.000.000,00 berupa pengadaan 1 unit Incubator BOD sesuai Surat Pesanan Nomor EP-01K0NQYMWDN5C0NNTJX66P7E0W tanggal 23 Juli 2025.
- 11) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp2.886.000,00 berupa pengadaan 2 unit Heating Mantle 500ml Joanlab HM Electric Lab Mixer Stirrer Laboratory 500ml sesuai kuitansi nomor 12/KKPRI-USBK/KWT/LK/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025.
- 12) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp42.180.000,00 berupa pengadaan 2 unit Current Meter Flowatch FL-03 sesuai kuitansi nomor 13/KKPRI-USBK/KWT/LK/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025.
- 13) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp10.545.000,00 berupa pengadaan 1 unit Centrifuge Gemmy PLC-03 sesuai kuitansi nomor 17/KKPRI-USBK/KWT/LK/XI/2025 tanggal 25 November 2025.
- 14) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp29.970.000,00 berupa pengadaan 1 unit Biobase Multi Position Hotplate Magnetic Stirrer MS-H280-S6 sesuai kuitansi nomor 18/KKPRI-USBK/KWT/LK/XI/2025 tanggal 25 November 2025.
- 15) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp4.845.150,00 berupa pengadaan 1 unit Controller dan Probe PH ORP Kedida Meter Water Controller Tester CT-6659 sesuai kuitansi nomor 26/KKPRI-USBK/KWT/LK/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025.

- 16) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp60.372.900,00 berupa pengadaan 1 unit Flow Chart Recorder 24 Hours Tisch Environment TE5009-X sesuai kuitansi nomor 27/KKPRI-USBER/KWT/LK//XII/2025 tanggal 16 Desember 2025.
- 17) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp30.279.690,00 berupa pengadaan 2 unit Showcase Polytron SCN 1020 sesuai kuitansi nomor 28/KKPRI-USBER/KWT/LK/XII/2025 tanggal 16 Desember 2025.
- 18) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp3.487.620,00 berupa pembelian 1 unit kursi kerja kantor sesuai invoice nomor 8864069T251119150349 tanggal 19 November 2025.
- 19) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp1.108.000,00 berupa pembelian 1 unit kursi kantor hitam sesuai invoice nomor 8899354T251216115139 tanggal 16 Desember 2025.
- 20) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp25.263.600,00 berupa pembelian 1 unit full polypropylene corrosive cabinet sesuai kuitansi nomor 089/KW2025 tanggal 19 Desember 2025.
- 21) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp32.190.000,00 berupa pembelian 1 unit anti vibration bench sesuai kuitansi nomor 090/KW/2025 tanggal 19 Desember 2025.
- 22) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp28.000.000,00 berupa pembelian 1 unit anti vibration bench sesuai invoice nomor INV-2025120007 tanggal 19 Desember 2025.
- 23) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp153.500.000,00 berupa pengadaan 1 unit Lemari Asam sesuai Surat Pesanan Nomor EP-01KBPPTJJYN7S23GJ1NWXFASA2 tanggal 8 Desember 2025.
- 24) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp16.998.540,00 berupa pembelian 2 unit horizontal water sampler sesuai Surat Pesanan Nomor 622/BBSPJPPI/PBJ/XI/2025 tanggal 17 Desember 2025.
- 25) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp5.999.998,00 berupa pembelian 2 unit surber stream sesuai kuitansi nomor 078/KWT-TES/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025.

- 26) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp5.300.000,00 berupa pembelian 2 unit well/grab sampler sesuai surat pesanan nomor 622/BBSPJPPI/PBJ/XI/2025 tanggal 17 Desember 2025.
- 27) Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp1000.000,00 berupa pembelian 1 unit meja pop up/polycounter big sesuai invoice tanggal 3 Desember 2025.
2. Transfer masuk sebesar Rp72.000.000,00 karena adanya pencatatan aset berupa alat AiMS milik BBSPJPPI yang ditempatkan di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim; Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan; Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Manado; Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan; Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru; Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya; Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh; dan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa.
3. Reklasifikasi masuk sebesar Rp72.000.000,00 karena adanya perbaikan atas kesalahan kodefikasi barang berupa 8 unit alat AiMS menjadi *particle counter* yang semula menggunakan kodifikasi alat uji emisi sumber bergerak.
4. Perolehan lainnya sebesar Rp49.956.660,00 karena adanya pencatatan kapitalisasi aset atas pemeliharaan gedung di tahun anggaran 2025 menggunakan sumber dana Rupiah Murni.
5. Penghentian aset dari Penggunaan sebesar (Rp356.190.184,00) karena adanya 68 unit peralatan dan mesin yang rusak berat dan akan dihapuskan, antara lain 1 unit meja dorong saji/trolley saji, 1 unit peralatan las listrik, 1 unit peralatan las lainnya, 7 unit lemari kayu, 4 unit CCTV, 13 unit kursi besi/metal, 11 unit AC Split, 16 unit intermediate telephone/key telephone, 1 unit PH meter digital, 3 unit UPS, 1 unit conductivity meter, 5 unit PC, 4 unit note book.
6. Transfer keluar sebesar (Rp1.425.018.000,00) karena adanya perpindahan aset berupa alat pengujian furniture meliputi rig uji

universal, load cell, unit laboratorium lainnya dan measuring/testing device lainnya milik Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri ke Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik.

7. Reklasifikasi keluar sebesar **(Rp72.000.000,00)** karena adanya kesalahan kodefikasi barang berupa 8 unit alat AiMS yang semula menggunakan kodifikasi alat uji emisi sumber bergerak menjadi *particle counter*.

Rincian aset tetap peralatan dan mesin ada pada Lampiran A1.

Gedung dan

Bangunan

Rp19.837.934.088,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp19.837.934.088,00 dan Rp18.513.497.851,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 45

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo per 31 Desember 2024	18.513.497.851,00
Mutasi Tambah:	1.324.436.237,00
Pengembangan	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	1.321.565.137,00
Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	2.871.100,00
Koreksi Nilai Revaluasi	0,00
Mutasi Kurang:	0,00
Reklasifikasi Keluar	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	19.837.934.088,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(6.460.794.123,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	13.377.139.965,00

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan
Jaringan

Rp21.907.000,00

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp21.907.000,00 dan Rp21.907.000,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 46

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo per 31 Desember 2024	21.907.000,00
Mutasi tambah:	0,00
Revaluasi Aset	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Koreksi Hasil Penilaian Kembali	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	21.907.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(11.952.063,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	9.954.937,00

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp10.343.211,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp10.343.211,00 dan Rp10.343.211,00. Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Mutasi transaksi terhadap aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 47

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo per 31 Desember 2024	10.343.211,00
Mutasi Tambah:	0,00
Pembelian	0,00
Mutasi Kurang:	0,00
Penghentian Aset dari penggunaan	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	10.343.211,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	10.343.211,00

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi dalam
Pengerjaan*
Rp0,00

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Mutasi transaksi konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 48
Rincian Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo per 31 Desember 2024	0,00
Mutasi Tambah:	0,00
Pengembangan KDP	0,00
Mutasi Kurang:	0,00
Koreksi nilai KDP	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0,00

Rincian konstruksi dalam pengerjaan ada pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap

(Rp50.746.487.793,00)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah (Rp50.746.487.793,00) dan (Rp47.901.994.969,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 49
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	100.566.767.000,00	0,00	100.566.767.000,00
2	Peralatan dan Mesin	57.703.088.944,00	(44.273.741.607,00)	13.429.347.337,00
3	Gedung dan Bangunan	19.837.934.088,00	(6.460.794.123,00)	13.377.139.965,00
4	Jalan, irigasi dan jaringan	21.907.000,00	(11.952.063,00)	9.954.937,00
5	Aset Tetap Lainnya	10.343.211,00	0,00	10.343.211,00
	Akumulasi Penyusutan	178.140.040.243,00	(50.746.487.793,00)	127.393.552.450,00

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya

Rp62.112.700,00

C.3. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp62.112.700,00 dan Rp73.017.876,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam

Aset Lancar aupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri per 31 Desember 2025 berupa Aset Tak Berwujud, Aset Lain-lain, dan Akumulasi penyusutan Aset Lainnya.

*Aset Tak Berwujud
Rp1.614.974.000,00*

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset tak berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp1.614.974.000,00 dan Rp1.614.974.000,00. Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 50

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

Saldo per 31 Desember 2024	1.614.974.000,00
Mutasi tambah:	0,00
Pembelian	0,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0,00
Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	0,00
Penghentian aset dari penggunaan	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	1.614.974.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(1.612.424.000,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	2.550.000,00

Rincian aset tak berwujud per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 51

Rincian Aset tak Berwujud

No	Aset Tak Berwujud	Nilai Perolehan	Mutasi		Saldo 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
1	Paten Biasa	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2	Software Komputer	1.611.974.000,00	0,00	0,00	1.611.974.000,00
	TOTAL	1.614.974.000,00	0,00	0,00	1.614.974.000,00

C.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

*Dana yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp0,00*

Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp70.317.876,00. Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan dana yang penggunaannya telah ditentukan atau tidak dapat digunakan secara bebas. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri tidak memiliki Dana yang Dibatasi Penggunaannya karena pada tahun 2025 tidak terdapat transaksi dengan mekanisme RPATA.

Tabel 52
Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

No	Persediaan	T.A 2025	T.A 2024
1	Jasa Outsourcing Tenaga Kebersihan	0,00	40.792.462,00
2	Jasa Outsourcing Petugas Keamanan	0,00	21.479.122,00
3	Jasa Outsourcing Pengemudi	0,00	8.046.292,00
Jumlah		0,00	70.317.876,00

Aset Lain-lain
Rp356.190.184,00

C.3.3. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp356.190.184,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 53
Rincian Mutasi Aset Lain-lain

Saldo per 31 Desember 2024	0,00
Mutasi tambah:	356.190.184,00
Pembelian	0,00
Pengembangan Aset	0,00
BMN yang dihentikan penggunaannya	0,00
Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	356.190.184,00
Mutasi kurang:	0,00
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	0,00
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	0,00
Penghapusan BMN	0,00
Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	356.190.184,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(296.627.484,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	59.562.700,00

Mutasi tambah aset lain-lain berupa transaksi reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp356.190.184,00 yang disebabkan oleh adanya barang dalam kondisi rusak berat dan tidak akan digunakan lagi dalam kegiatan operasional Satker.

Akumulasi
Penyusutan Aset Lain-lain
(Rp1.909.051.484,00)

C.3.4. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah (Rp1.909.051.484,00) dan (Rp1.612.274.000,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain merupakan kontra akun Aset lain-lain yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat Aset Lain-lain. Akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 54
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Paten	3.000.000,00	(450.000,00)	2.550.000,00
Software Komputer	1.611.974.000,00	(1.611.974.000,00)	0,00
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	356.190.184,00	(296.627.484,00)	59.562.700,00
Jumlah	1.971.164.184,00	(1.909.051.484,00)	62.112.700,00

Rincian akumulasi penyusutan aset lain-lain disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Kewajiban Jangka Pendek
Rp1.474.653.824,00

C.4.Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek BBSPJPPI per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp1.474.653.824,00 dan Rp3.169.759.940,00.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp700.346.824,00

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp700.346.824,00 dan Rp1.565.141.350,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga dalam waktu kurang dari 12 bulan. Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 terdiri dari belanja pegawai yang masih harus dibayar berupa pembayaran tunjangan kinerja PNS dan PPPK atas kinerja bulan Desember 2025 yang dibayarkan pada bulan Januari 2026, kemudian belanja barang yang masih harus dibayar berupa pembayaran tagihan telepon dan air atas pemakaian bulan Desember 2025 yang dibayarkan pada bulan Januari 2026, utang kepada pihak ketiga BLU berupa pembayaran tagihan listrik dan zoom bulan Desember 2025 yang dibayarkan pada bulan Januari 2026. Nilai utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 55
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	645.560.840,00	Tunjangan Kinerja PNS dan PPPK bulan Desember 2025
Belanja barang yang masih harus dibayar	539.540,00	Tagihan telepon dan air menggunakan sumber dana RM bulan Desember 2025
Utang Kepada Pihak Ketiga BLU	54.246.444,00	Tagihan listrik dan zoom menggunakan sumber dana BLU bulan Desember 2025
Saldo per 31 Desember 2025	700.346.824,00	

Rincian utang kepada pihak ketiga disajikan pada Daftar Lampiran Laporan Keuangan ini.

Uang Muka dari
KPPN Rp0,00

C.4.2. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Pendapatan Yang
Ditangguhkan
Rp0,00

C.4.3. Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBPN dan pengembalian belanja yang belum disetorkan ke kas negara.

Pendapatan Diterima
Dimuka
Rp774.307.000,00

C.4.4. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp774.307.000,00 dan Rp1.604.618.590,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Pendapatan Diterima Dimuka pada BBSPJPPI berupa pembayaran dari pelanggan yang sampai

pada tanggal pelaporan ini pekerjaannya belum terselesaikan. Per 31 Desember 2025 pendapatan diterima dimuka mengalami penurunan karena bertambahnya pegawai BBSPJPPI membuat pekerjaan jasa layanan semakin banyak yang telah diselesaikan hingga akhir tahun 2025, walaupun BBSPJPPI juga mengalami peningkatan volume pekerjaan. Pendapatan yang diterima tersebut telah menjadi hak sepenuhnya dari Satker. Rincian pendapatan diterima di muka disajikan pada Daftar Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp0,00*

C.4.5. Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Utang yang belum ditagihkan timbul karena adanya kuitansi yang akan dibayarkan pada bulan berikutnya.

*Utang Jangka Pendek
Lainnya
Rp0,00*

C.4.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Utang jangka pendek lainnya merupakan kewajiban lancar yang harus dibayar dalam waktu satu tahun.

*Ekuitas
Rp133.676.273.106,00*

C.5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp133.676.273.106,00 dan Rp131.091.313.350,00. Pada tahun anggaran 2025, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri mengalami peningkatan ekuitas. Hal ini terjadi karena adanya perubahan pada jumlah aset yang bertambah melalui transaksi pembelian, transfer masuk dan kapitalisasi aset, serta perubahan pada jumlah kewajiban satker yang berkurang karena penurunan jumlah hutang dan pendapatan diterima di muka.

D. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

Operasional

Rp37.425.085.225,00

D.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp37.425.085.225,00 dan Rp41.756.802.009,00. Pendapatan Operasional merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional BLU. Rincian Pendapatan disajikan sebagai berikut.

*Tabel 56
Rincian Pendapatan Operasional
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	2025	2024	Naik (Turun) %
1. Pendapatan Alokasi APBN	17.335.122.831,00	22.228.595.676,00	(22,01)
2. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	19.901.623.380,00	19.176.278.979,00	3,78
3. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	86.891.000,00	292.609.490,00	(70,30)
4. Pendapatan Hibah BLU	0,00	0,00	0,00
5. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	0,00	0,00	0,00
6. Pendapatan BLU Lainnya	101.448.014,00	59.317.864,00	71,02
TOTAL	37.425.085.225,00	41.756.802.009,00	(10,37)

Pendapatan Alokasi APBN sebesar Rp17.335.122.831,00 merupakan pendapatan yang berasal dari SP2D Rupiah Murni berdasarkan DIPA tahun 2025. Pendapatan Alokasi APBN pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (22,01) persen dibandingkan dengan tahun 2024. Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan jumlah anggaran belanja dari sumber dana Rupiah Murni yang dapat direalisasikan khususnya pada belanja barang dan modal.

Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat sebesar Rp19.901.623.380,00 merupakan pendapatan dari layanan jasa yang diterima oleh BBSPJPPI dari Pelanggan. Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 3,78 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Hal tersebut terjadi karena adanya inovasi jasa layanan baru pada lingkup pengujian kalibrasi, meningkatnya minat industri pada jasa verifikasi TKDN dan uji profisiensi, serta adanya produksi alat AiMs dari BBSPJPPI yang mulai dipasarkan.

Pendapatan jasa layanan dari entitas lain sebesar Rp86.891.000,00 merupakan pendapatan yang didapat dari satu Kementerian/Lembaga. Pendapatan jasa layanan dari entitas lain pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (70,30) persen dibandingkan dengan tahun 2024. Hal

tersebut terjadi karena adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025 yang juga dialami oleh Satker lain di satu Kementerian, sehingga pendapatan jasa layanan dari satu K/L mengalami penurunan.

Pendapatan BLU Lainnya sebesar Rp101.448.014,00 merupakan pendapatan yang berasal dari jasa giro. Pendapatan BLU Lainnya pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 71,02 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Hal tersebut terjadi karena saldo di rekening BLU pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan saldo di rekening BLU pada tahun 2024, sehingga jasa giro yang diterima pada rekening BLU juga lebih banyak.

Pendapatan pada Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2025 sebesar Rp20.089.962.394,00 berbeda dengan jumlah pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 31 Desember 2025 yang sebesar Rp20.537.608.928,00. Selisih pendapatan pada LO dan LRA disajikan sebagai berikut.

*Tabel 57
Selisih Pendapatan LO dan LRA per 31 Desember 2025*

Uraian	LRA	Uraian	LO	Selisih
Pendapatan BLU	20.160.742.350,00	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	19.901.623.380,00	259.118.970,00
Pendapatan BLU	89.441.000,00	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	86.891.000,00	2.550.000,00
Pendapatan BLU	233.172.603,00	Pendapatan BLU Lainnya	101.448.014,00	131.724.589,00
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	54.252.975,00			54.252.975,00
	20.537.608.928,00		20.089.962.394,00	447.646.534,00

Selisih pendapatan pada LO dan LRA sebesar Rp447.646.534,00 terjadi karena LO mengakui seluruh jurnal akrual tahun 2025 yang berkaitan dengan pendapatan seperti jurnal balik atas Pendapatan Diterima di Muka (PDM), piutang, dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (PYMHD) per 31 Desember 2024, serta jurnal penyesuaian atas PDM, piutang, dan PYMHD per 31 Desember 2025. Namun pendapatan operasional pada LO belum termasuk dengan pendapatan PNBPN lainnya berupa penerimaan kembali belanja barang BLU TAYL sebesar Rp76.724.589,00, pelepasan aset sebesar Rp17.232.003,00, sewa rumah dinas sebesar Rp6.960.000,00, pengembalian belanja pegawai TAYL sebesar Rp375,00, dan pengembalian belanja barang TAYL sebesar

Rp30.060.597,00, karena pendapatan tersebut diakui sebagai pendapatan dari kegiatan non operasional. Sedangkan LRA mengakui seluruh pendapatan yang telah disahkan di tahun 2025 termasuk pendapatan pendapatan dari kegiatan non operasional yang disebut sebagai pendapatan PNPB lainnya. Rincian selisih pendapatan jasa layanan dari masyarakat disajikan sebagai berikut.

Tabel 58
Rincian Selisih Pendapatan per 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah
Jurnal balik atas PDM per 31 Desember 2024	(1.604.618.590,00)
Jurnal balik atas piutang per 31 Desember 2024	16.745.000,00
Jurnal balik atas PYMHD per 31 Desember 2024	2.534.139.400,00
Jurnal penyesuaian atas koreksi PYMHD per 31 Desember 2024	494.646.600,00
Jurnal penyesuaian atas PDM per 31 Desember 2025	774.307.000,00
Jurnal penyesuaian atas piutang per 31 Desember 2025	(8.145.000,00)
Jurnal penyesuaian atas PYMHD per 31 Desember 2025	(1.890.405.440,00)
Pendapatan Pelepasan Aset per 31 Desember 2025	17.232.003,00
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember	113.745.561,00
Total	447.646.534,00

Beban Pegawai

Rp16.498.724.254,00

D.2. Beban Pegawai

Beban pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp16.498.724.254,00 dan Rp15.437.942.932,00. Beban Pegawai merupakan beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian beban pegawai disajikan sebagai berikut.

Tabel 59
Rincian Beban Pegawai
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	2025	2024	Naik (Turun) %
Beban gaji dan tunjangan PNS	7.700.397.464,00	7.280.252.149,00	5,77
Beban gaji dan tunjangan PPPK	350.673.056,00	182.624.220,00	92,02
Beban Lembur	49.836.000,00	70.755.000,00	(29,57)
Beban Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja	8.079.114.561,00	7.720.630.278,00	4,64
Beban Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	318.703.173,00	183.681.285,00	73,51
Jumlah	16.498.724.254,00	15.437.942.932,00	6,87

Beban pegawai pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 6,87 persen dari tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena adanya pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji untuk 11 orang CPNS mulai bulan Juni 2025 dan terdapat beberapa pegawai yang mengalami perpindahan dari pelaksana ke fungsional, selain itu adanya pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji untuk 16 orang PPPK mulai bulan Oktober 2025.

Beban pegawai pada LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.498.724.254,00 berbeda dengan belanja pegawai pada LRA per 31 Desember 2025 yang sebesar Rp16.410.353.467,00. Selisih beban pegawai pada LO dan LRA disajikan sebagai berikut.

*Tabel 60
Selisih Beban Pegawai LO dan LRA per 31 Desember 2025*

Uraian	Realisasi LRA	Uraian	Realisasi LO	Selisih
Belanja Pegawai	16.410.353.467,00	Beban Pegawai	16.498.724.254,00	(88.370.787,00)

Selisih beban pegawai pada LO dan LRA sebesar (Rp88.370.787,00) terjadi karena LO mengakui adanya jurnal akrual tahun 2025 yang berkaitan dengan belanja pegawai seperti jurnal balik atas pembayaran tunjangan kinerja PNS dan PPPK bulan Desember 2024, jurnal penyesuaian atas pembayaran tunjangan kinerja PNS dan PPPK bulan Desember 2025, serta jurnal penyesuaian atas pengembalian kelebihan uang makan bulan Desember 2025. Sedangkan belanja pegawai pada LRA hanya mengakui seluruh belanja pegawai yang telah direalisasikan tahun 2025. Rincian selisih beban pegawai disajikan sebagai berikut.

*Tabel 61
Rincian Selisih Beban Pegawai per 31 Desember 2025*

Uraian	Jumlah
Jurnal balik atas pembayaran Tunjangan Kinerja PNS bulan Desember 2024	544.374.353,00
Jurnal balik atas pembayaran Tunjangan Kinerja PPPK bulan Desember	12.700.700,00
Jurnal penyesuaian atas pembayaran Tunjangan Kinerja PNS bulan Desember 2025	(573.352.040,00)
Jurnal penyesuaian atas pembayaran Tunjangan Kinerja PPPK bulan Desember 2025	(72.208.800,00)
Jurnal penyesuaian atas pengembalian kelebihan Uang Makan bulan Desember 2025	115.000,00
Total	(88.370.787,00)

Beban Persediaan
Rp1.357.340.889,00

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp1.357.340.889,00 dan Rp1.088.707.444,00. Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi, baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian beban persediaan disajikan sebagai berikut.

*Tabel 62
Rincian Beban Persediaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	2025	2024	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	122.178.906,00	189.678.499,00	(35,59)
Beban Persediaan Bahan Baku	1.220.044.328,00	883.357.555,00	38,11
Beban persediaan lainnya	15.117.655,00	15.671.390,00	(3,53)
Jumlah	1.357.340.889,00	1.088.707.444,00	24,67

Beban persediaan pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 24,67 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan beban persediaan ini menandakan bahwa kebutuhan persediaan BBSPJPPI di tahun 2025 lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan persediaan di tahun 2024. Hal tersebut terjadi karena adanya produksi alat AiMs dari BBSPJPPI yang mulai dipasarkan. Produksi tersebut menambah beban persediaan bahan baku pada tahun 2025.

Beban persediaan pada LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.357.340.889,00 berbeda dengan belanja persediaan pada LRA per 31 Desember 2025 yang sebesar Rp3.865.356.853,00. Selisih beban persediaan pada LO dan LRA disajikan sebagai berikut.

*Tabel 63
Selisih Beban Persediaan LO dan LRA per 31 Desember 2025*

Uraian	Realisasi LRA	Uraian	Realisasi LO	Selisih
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	2.996.403.164,00	Beban Persediaan konsumsi	122.178.906,00	2.874.224.258,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	494.566.229,00	Beban Persediaan bahan baku	1.220.044.328,00	(725.478.099,00)
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi	374.387.460,00	Beban persediaan lainnya	15.117.655,00	359.269.805,00
	3.865.356.853,00		1.357.340.889,00	2.508.015.964,00

Selisih beban persediaan pada LO dan LRA sebesar Rp2.508.015.964,00 terjadi karena LO mengakui seluruh transaksi yang mempengaruhi nilai

persediaan termasuk jurnal akrual yang berkaitan dengan persediaan seperti jurnal penyesuaian atas pembayaran utang persediaan tahun 2024. Beban persediaan pada LO juga melibatkan saldo persediaan awal dan saldo persediaan akhir, serta tidak mengakui adanya persediaan untuk pemeliharaan dan suku cadang karena persediaan tersebut masuk dalam beban pemeliharaan. Selain itu terdapat persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang pekerjaannya telah selesai dan terbit BAST di tahun 2025 dan terdapat transfer masuk berupa persediaan 41 unit daun pintu dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) yang diakui sebagai beban persediaan pada LO. Sedangkan belanja persediaan pada LRA hanya mengakui seluruh belanja persediaan yang telah direalisasikan tahun 2025. Rincian selisih beban persediaan disajikan sebagai berikut.

Tabel 64
Rincian Selisih Beban Persediaan per 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah
Persediaan Awal	(321.246.790,00)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	53.840.193,00
Beban Persediaan suku cadang	2.064.036.876,00
Transfer Masuk	(163.487.144,00)
Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	594.756.311,00
jurnal akrual pembayaran utang persediaan tahun 2024	2.181.150,00
jurnal akrual pembayaran utang persediaan tahun 2024	2.337.993,00
jurnal akrual pembayaran utang persediaan tahun 2024	54.914.830,00
Persediaan Akhir	220.682.545,00
Total	2.508.015.964,00

Beban Barang dan Jasa
Rp7.447.371.054,00

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp7.447.371.054,00 dan Rp8.868.445.524,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan sebagai berikut.

Tabel 65
Rincian Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	2025	2024	Naik (Turun) %
Beban Barang Operasional	93.171.525,00	507.067.415,00	(100,00)
Beban Barang Non Operasional	0,00	63.059.688,00	(100,00)
Beban Daya Jasa	218.760.125,00	772.966.176,00	43,82
Beban Jasa	0,00	933.589.512,00	370,57
Beban Barang BLU	1.111.656.352,00	1.354.984.517,00	18,26
Beban Jasa BLU	4.393.231.852,00	4.096.967.479,00	(100,00)
Beban Jasa BLU Kepada BLU Lain Satu K/L	1.602.464.000,00	1.093.155.600,00	(100,00)
Beban Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel	0,00	40.946.999,00	(100,00)
Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	0,00	0,00	0,00
Beban Gedung dan Bangunan-Ekstrakomptabel BLU	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	28.087.200,00	5.708.138,00	100,00
Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel BLU	0,00	0,00	0,00
Jumlah	7.447.371.054,00	8.868.445.524,00	(16,02)

Beban barang dan jasa pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (16,02) persen dari tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran yang menghilangkan anggaran belanja barang non operasional, belanja jasa, serta belanja peralatan dan mesin-ekstrakomptabel yang menggunakan sumber dana Rupiah Murni sehingga berpengaruh pada menurunnya beban barang dan jasa Satker. Beban barang dan jasa pada LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.447.371.054,00 berbeda dengan belanja barang dan jasa pada LRA per 31 Desember 2025 yang sebesar Rp8.267.318.812,00. Rincian selisih beban barang dan jasa disajikan sebagai berikut.

Tabel 66
Selisih Beban Barang dan Jasa LO dan LRA per 31 Desember 2025

Uraian	Realisasi LRA	Uraian	Realisasi LO	Selisih
Belanja Keperluan Perkantoran	8.985.700,00	Beban Keperluan Perkantoran	9.466.700,00	(481.000,00)
Belanja Honor Operasional	80.416.000,00	Beban Honor Operasional	80.416.000,00	0,00
Belanja Barang Operasional Lainnya	4.955.028,00	Beban Barang Operasional Lainnya	3.288.825,00	1.666.203,00
Belanja Langganan Listrik	269.602.596,00	Beban Langganan Listrik	211.217.025,00	58.385.571,00
Belanja Langganan Telepon	4.972.386,00	Beban Langganan Telepon	5.016.708,00	(44.322,00)
Belanja Langganan Air	2.528.192,00	Beban Langganan Air	2.526.392,00	1.800,00
Belanja Barang	1.111.318.440,00	Beban Barang	1.111.656.352,00	(337.912,00)
Belanja Jasa	5.152.989.270,00	Beban Jasa	4.393.231.852,00	759.757.418,00
Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu	1.602.464.000,00	Beban Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu	1.602.464.000,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	29.087.200,00	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	28.087.200,00	1.000.000,00
Jumlah	8.267.318.812,00	Jumlah	7.447.371.054,00	819.947.758,00

Selisih beban barang dan jasa pada LO dan LRA sebesar Rp819.947.758,00 terjadi karena LO mengakui adanya jurnal akrual yang berkaitan dengan belanja barang dan jasa seperti jurnal balik atas pembayaran google (*prepaid*) tahun 2025, jurnal balik atas pembayaran listrik, telepon, dan

air bulan Desember 2024, jurnal penyesuaian atas pembayaran hutang BLU tahun 2024, jurnal penyesuaian atas pembayaran google (*prepaid*) tahun 2026, serta jurnal penyesuaian atas pembayaran listrik, telepon, air, dan zoom bulan Desember 2025. Selain itu pada LRA telah mengakui adanya pembelian 1 unit meja pop up senilai Rp1.000.000,00 sebagai belanja barang ekstrakomtabel namun karena terdapat ketidaksesuaian akun vs kode barang maka meja tersebut tidak diakui sebagai beban barang dan jasa LO tetapi diakui sebagai barang intrakomtabel atau aset tetap. Sedangkan belanja barang dan jasa pada LRA hanya mengakui seluruh belanja barang dan jasa yang telah direalisasikan tahun 2025. Rincian selisih beban barang dan jasa disajikan sebagai berikut.

Tabel 67

Rincian Selisih Beban Barang dan Jasa LO dan LRA per 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah
Jurnal balik atas pembayaran google (<i>prepaid</i>) tahun 2025	(481.000,00)
Jurnal balik atas pembayaran listrik bulan Desember 2025	58.385.571,00
Jurnal balik atas pembayaran telepon bulan Desember 2024	285.718,00
Jurnal balik atas pembayarana air bulan Desember 2024	211.300,00
Jurnal penyesuaian atas pembayaran hutang BLU tahun 2024	813.665.950,00
Jurnal penyesuaian atas pembayaran google (<i>prepaid</i>) tahun 2026	1.666.203,00
Jurnal penyesuaian atas pembayaran listrik bulan Desember 2025	(53.908.532,00)
Jurnal penyesuaian atas pembayaran telepon bulan Desember 2025	(330.040,00)
Jurnal penyesuaian atas pembayaran air bulan Desember 2025	(209.500,00)
Jurnal penyesuaian atas pembayaran zoom Desember 2025	(337.912,00)
Ketidaksesuaian akun vs kode barang	1.000.000,00
Total	819.947.758,00

Beban Pemeliharaan
Rp2.710.371.745,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp2.710.371.745,00 dan Rp3.274.673.302,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan disajikan sebagai berikut.

Tabel 68
Rincian Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	2025	2024	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	157.330.639,00	778.742.156,00	(79,80)
Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin	262.448.242,00	455.446.250,00	(42,38)
Beban Pemeliharaan BLU	172.715.795,00	364.336.713,00	(52,59)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	53.840.193,00	34.154.925,00	57,64
Beban Persediaan suku cadang	2.064.036.876,00	1.641.993.258,00	25,70
Jumlah	2.710.371.745,00	3.274.673.302,00	(17,23)

Beban pemeliharaan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (17,23) persen dari tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran belanja pemeliharaan yang mengurangi anggaran khususnya anggaran belanja pemeliharaan dengan sumber dana Rupiah Murni, serta anggaran belanja pemeliharaan yang berkaitan dengan pemeliharaan gedung dan bangunan, sehingga Satker belum dapat merealisasikan belanja pemeliharaan yang telah direncanakan sebelumnya dan mengakibatkan turunnya beban pemeliharaan Satker pada tahun 2025.

Beban pemeliharaan pada LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp592.494.676,00 berbeda dengan belanja pemeliharaan pada LRA per 31 Desember 2025 yang sebesar Rp1.330.602.992,0. Selisih beban pemeliharaan pada LO dan LRA disajikan sebagai berikut.

Tabel 69
Selisih Beban Pemeliharaan LO dan LRA per 31 Desember 2025

Uraian	Realisasi LRA	Uraian	Realisasi LO	Selisih
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	290.861.220,00	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	157.330.639,00	133.530.581,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	262.448.242,00	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	262.448.242,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	777.293.530,00	Beban Pemeliharaan	172.715.795,00	604.577.735,00
	1.330.602.992,00		592.494.676,00	738.108.316,00

Selisih beban pemeliharaan pada LO dan LRA sebesar Rp738.108.316,00 terjadi karena pada LO mengakui jurnal akrual yang berkaitan dengan belanja pemeliharaan seperti jurnal penyesuaian atas kapitalisasi aset, sedangkan belanja pemeliharaan pada LRA hanya mengakui seluruh belanja pemeliharaan yang telah direalisasikan tahun 2025. Rincian selisih beban pemeliharaan disajikan sebagai berikut.

Tabel 70
Rincian Selisih Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah
Jurnal penyesuaian atas kapitalisasi aset tahun 2025	49.956.660,00
Jurnal penyesuaian atas kapitalisasi aset tahun 2025	199.648.335,00
Jurnal penyesuaian atas kapitalisasi aset tahun 2025	49.728.000,00
Jurnal penyesuaian atas kapitalisasi aset tahun 2025	150.434.600,00
Jurnal penyesuaian atas kapitalisasi aset tahun 2025	154.810.140,00
Jurnal penyesuaian atas kapitalisasi aset tahun 2025	133.530.581,00
Total	738.108.316,00

Beban Perjalanan Dinas

Rp3.106.703.281,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp3.106.703.281,00 dan Rp4.620.981.229,00. Beban perjalanan dinas tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian beban perjalanan dinas disajikan sebagai berikut.

Tabel 71
Rincian Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	2025	2024	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	0,00	785.782.347,00	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket meeting luar kota	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan	3.106.703.281,00	3.835.198.882,00	(18,99)
Jumlah	3.106.703.281,00	4.620.981.229,00	(32,77)

Beban perjalanan dinas pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (32,77) persen dari tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran yang mengurangi anggaran belanja perjalanan khususnya belanja perjalanan dinas dengan sumber dana Rupiah Murni. Beberapa aktivitas yang sebelumnya dihadiri secara luring dan membutuhkan anggaran belanja perjalanan dinas, tahun 2025 digantikan dengan hadir secara daring sehingga tidak membutuhkan anggaran perjalanan dinas.

Beban perjalanan dinas pada LO per 31 Desember 2025 sama dengan belanja perjalanan pada LRA per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp3.106.703.381,00, sehingga tidak terdapat selisih antara keduanya. Hal tersebut karena tidak terdapat koreksi maupun jurnal akrual yang berkaitan dengan belanja perjalanan dinas. Selisih beban perjalanan

pada LO dan LRA disajikan sebagai berikut.

Tabel 72
Selisih Beban Perjalanan Dinas LO dan LRA per 31 Desember 2025

Uraian	Realisasi LRA	Uraian	Realisasi LO	Selisih
Belanja Perjalanan	3.106.703.281,00	Beban Perjalanan Dinas	3.106.703.281,00	0,00

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp594.756.311,00*

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp594.756.311,00 dan Rp0,00. Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Rincian Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat disajikan sebagai berikut.

Tabel 73
*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	2025	2024	Naik (Turun) %
Beban Gedung & Bangunan diserahkan kepada masyarakat/pemda	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan & Mesin diserahkan kepada masyarakat/pemda	0,00	0,00	0,00
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	594.756.311,00	0,00	100,00
Jumlah	594.756.311,00	0,00	100,00

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 100 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan beban persediaan ini terjadi karena adanya produksi alat AiMS pada tahun 2025. Jumlah beban tersebut sesuai dengan BAST tanggal 13 Februari 2025 sebesar Rp220.368.851,00, BAST tanggal 9 Juli 2025 sebesar Rp319.680.000,00, dan BAST tanggal 15 Desember 2025 sebesar Rp54.707.460,00.

*Beban Bantuan Sosial
Rp0,00*

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang atau jasa

kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian beban bantuan sosial disajikan sebagai berikut.

Tabel 74
Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	2025	2024	Naik (Turun) %
Beban Bansos untuk Rehabilitasi Sosial	0,00	0,00	0,00
Beban Bansos untuk Jaminan Sosial	0,00	0,00	0,00
Beban Bansos untuk Pemberdayaan Sosial	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp4.249.141.800,00

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp4.249.141.800,00 dan Rp4.046.889.893,00. Beban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset tersebut. Sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud. Rincian beban penyusutan dan amortisasi disajikan sebagai berikut.

Tabel 75
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	2025	2024	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	3.372.436.136,00	3.017.135.804,00	11,78
Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	870.342.639,00	804.219.964,00	8,22
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan	1.406.125,00	1.406.125,00	0,00
Beban Amortisasi Paten	150.000,00	150.000,00	0,00
Beban Amortisasi Software	0,00	223.978.000,00	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	4.806.900,00	0,00	100,00
Jumlah	4.249.141.800,00	4.046.889.893,00	5,00

Beban penyusutan dan amortisasi pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 5,00 persen dari tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena meningkatnya aset BBSPJPPI sehingga beban penyusutan dan amortisasi ikut meningkat.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp7.478.450,00

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp7.478.450,00 dan Rp666.550,00.

Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktagihan piutang dalam satu periode tahun anggaran berjalan. Rincian beban penyisihan piutang tak tertagih disajikan sebagai berikut.

Tabel 76
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	2025	2024	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	7.478.450,00	666.550,00	1.021,96
Jumlah	7.478.450,00	666.550,00	1.021,96

Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 1.021,96 persen dari tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena adanya piutang dengan kategori macet milik PT Tekstil Industri Palekat dengan nominal piutang sebesar Rp8.145.000,00. Penyisihan piutang tak tertagih dihitung sebesar 100% dari jumlah piutang dengan kategori macet pada periode berjalan. Namun terdapat jurnal akrual berupa jurnal balik atas penyisihan piutang tak tertagih tahun 2024 sebesar Rp666.050,00 sehingga beban penyisihan piutang tidak tertagih BLU tercatat sebesar Rp7.478.450,00.

Beban Lain-lain
Rp0,00

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian beban lain-lain disajikan sebagai berikut.

Tabel 77
Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	2025	2024	Naik (Turun) %
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
(Rp76.724.589,00)

D.12. Kegiatan Non Operasional

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp76.724.589,00 dan (Rp276.110.040,00). Pos Surplus/defisit dari kegiatan non operasional

terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian surplus/defisit dari kegiatan non operasional disajikan sebagai berikut.

Tabel 78
Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	2025	2024	Naik (Turun) %
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	17.232.003,00	(276.110.040,00)	106,24
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	17.232.003,00	0,00	100,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	(276.110.040,00)	(100,00)
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	59.492.586,00	0,00	100,00
Pendapatan sewa tanah,gedung dan bangunan	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL	76.724.589,00	0,00	100,00
Pendapatan kembali Belanja Pegawai TAYL	375,00	50.445.000,00	(100,00)
Pendapatan kembali Belanja Barang TAYL	30.060.597,00	0,00	100,00
Pendapatan Penyesuaian nilai persediaan	0,00	0,00	0,00
Beban persediaan rusak/usang	0,00	0,00	0,00
Penyetoran PNPB oleh BLU ke kas negara	(54.252.975,00)	(57.405.000,00)	(5,49)
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional	76.724.589,00	(276.110.040,00)	127,79

Kegiatan Non Operasional pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 127,79 persen dari tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena adanya surplus dari kegiatan non operasional berupa pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya atas lelang barang rusak berat bulan Januari 2025 dan pendapatan kembali belanja barang BLU TAYL atas pengembalian biaya perjalanan dinas BLU tahun 2024 yang tidak ada pada periode sebelumnya.

Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Pos luar biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan tidak dapat diramalkan, serta berada di luar kendali entitas. Rincian pos luar biasa disajikan sebagai berikut.

Tabel 79
Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	2025	2024	Naik (Turun) %
Pendapatan PNPB	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp131.091.313.350,00

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 masing-masing adalah Rp131.091.313.350,00 dan Rp126.749.461.156,00. Pada 1 Januari 2025, ekuitas awal BBSPJPPI mengalami peningkatan dibandingkan dengan ekuitas awal pada 1 Januari 2024, karena bertambahnya jumlah aset di tahun sebelumnya.

Surplus/Defisit LO

Rp1.529.922.030,00

E.2. Surplus (Defisit) LO

Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp1.529.922.030,00 dan Rp4.142.385.095,00. Surplus LO merupakan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Pada tahun 2025 terjadi penurunan surplus LO dibanding tahun sebelumnya karena adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran sehingga mengurangi jumlah pendapatan alokasi APBN yang mengakibatkan pendapatan operasional tahun 2025 menjadi lebih rendah daripada tahun 2024. Walaupun beban operasionalnya juga lebih rendah namun pendapatan operasional yang lebih rendah mengakibatkan selisih antara pendapatan dan belanja operasional tahun 2025 lebih rendah daripada tahun 2024.

Koreksi Yang

Menambah/Mengurangi

Ekuitas

Rp945.818.775,00

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp945.818.775,00 dan Rp199.467.099,00. Koreksi tersebut meliputi koreksi nilai aset tetap non revaluasi dan koreksi lain-lain.

Penyesuaian Nilai Aset

Rp0,00

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai**Persediaan**Rp0,00***E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

*Koreksi atas**Reklasifikasi**Rp0,00***E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi**

Koreksi Atas Reklasifikasi mencerminkan koreksi yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan terhadap transaksi yang dicatat tidak sesuai dengan klasifikasi pada periode sebelumnya. Koreksi atas reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

*Revaluasi Aset Tetap**Rp0,00***E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

*Koreksi Nilai Aset Tetap**Non Revaluasi**Rp445.406.266,00***E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp445.406.266,00 dan Rp117.547.373,00. Koreksi nilai aset tetap non revaluasi terjadi karena adanya revaluasi dimana terdapat perubahan nilai aset yang menyebabkan penambahan maupun penurunan nilai aset, sehingga penyesuaiannya tercatat sebagai koreksi nilai aset non revaluasi.

*Koreksi Lain-lain**Rp500.412.509,00***E.3.6 Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp500.412.509,00 dan Rp81.919.726,00. Koreksi lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait dengan Barang Milik Negara. Koreksi lain-lain tersebut meliputi koreksi

atas pendapatan dan koreksi atas beban. Koreksi lain-lain disajikan sebagai berikut.

Tabel 80
Rincian Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2025

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	5.765.909,00
Koreksi Pendapatan	494.646.600,00
Koreksi Piutang	0,00
Koreksi Kewajiban	0,00
Koreksi Hibah	0,00
Jumlah	500.412.509,00

Koreksi beban pada tahun 2025 terdiri dari jurnal balik atas pembayaran zoom bulan Desember 2024 sebesar Rp5.045.909,00 dan jurnal balik atas pembayaran surat kabar bulan Desember 2024 sebesar Rp720.00,00 yang dilakukan jurnal koreksi pada koreksi lain-lain. Sedangkan koreksi pendapatan pada tahun 2025 terdiri dari jurnal penyesuaian atas koreksi PYMHD tahun 2024 sebesar Rp494.646.600,00 yang dilakukan jurnal koreksi pada koreksi lain-lain.

Transaksi Antar Entitas
Rp109.218.851,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp109.218.951,00 dan Rp0,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas disajikan sebagai berikut.

Tabel 81
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke entitas lain	0,00
Diterima dari entitas lain	0,00
Transfer masuk	220.058.576,00
Transfer keluar	(110.839.625,00)
Pengesahan hibah langsung	0,00
Pengesahan Pengembalian hibah langsung	0,00
Jumlah	109.218.951,00

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan

transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Per 31 Desember 2025, terhitung DDEL sebesar Rp0,00 sedangkan DKEL sebesar Rp0,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp220.058.576,00 berupa perpindahan aset meliputi 8 unit alat AiMS dari BBSPJI Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim, BBSPJI Kimia, Farmasi, dan Kemasan, BSPJI Manado, BSPJI Medan, BSPJI Pekanbaru, BSPJI Surabaya, BBSPJI Banda Aceh, dan BBSPJI Selulosa, serta 41 unit daun pintu dari BPSDMI. Transfer keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar **(Rp110.839.625,00)** berupa perpindahan aset meliputi rig uji universal, load cell, unit laboratorium lainnya dan measuring/testing device ke BBSPJI Kerajinan dan Batik.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Per 31 Desember 2025 tidak terdapat transaksi Hibah Langsung di BBSPJPPI.

Ekuitas Akhir

Rp133.676.273.106,00

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp133.676.273.106,00 dan Rp131.091.313.350,00. Per 31 Desember 2025, ekuitas akhir BBSPJPPI bertambah sebesar Rp2.584.959.756,00 dari ekuitas awal sebesar Rp131.091.313.350,00. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan jumlah aset dan kewajiban Satker sehingga mempengaruhi nilai ekuitas akhir tahun 2025.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

F.1.1. SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2025 adalah Rp2.937.097.225,00. Apabila dibandingkan dengan Saldo Awal Kas tahun 2024, maka terdapat penurunan sebesar (24,67) persen. Rincian saldo awal Kas disajikan sebagai berikut.

Tabel 82
Rincian Saldo Awal Kas per 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
Kas pada BLU yang telah disahkan	2.937.097.225,00	3.898.883.652,00
Saldo Awal Kas BLU Sebelum Penyesuaian	2.937.097.225,00	3.898.883.652,00
Penyesuaian Saldo Awal		
Penyesuaian Kas BLU	0,00	0,00
Penyesuaian Kas Dana yang Dibatasi	0,00	0,00
Penyesuaian Kas Rekening Escrow	0,00	0,00
Total Penyesuaian Saldo Awal	0,00	0,00
Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU Setelah	2.937.097.225,00	3.898.883.652,00

F.1.2. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp2.645.295.367,00 dan (Rp961.786.427,00). Rincian kenaikan (penurunan) kas disajikan sebagai berikut.

Tabel 83
Kenaikan (Penurunan) Kas
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	4.820.911.376,00	8.683.641.154,00
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi	(2.175.616.009,00)	(9.645.427.581,00)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Transistoris	0,00	0,00
Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Penyesuaian	2.645.295.367,00	(961.786.427,00)

Kas dari aktivitas operasi merupakan kas bersih dari aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional. Aktivitas operasi per 31 Desember 2025 menunjukkan arus kas bersih sebesar Rp4.820.911.376,00.

Kas dari aktivitas investasi merupakan kas bersih dari kegiatan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Aktivitas investasi per 31 Desember 2025 menunjukkan arus kas bersih sebesar (Rp2.175.616.009,00).

Kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan kas bersih yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang. Aktivitas pendanaan per 31 Desember 2025 menunjukkan arus kas bersih sebesar Rp0,00.

Kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan kas bersih yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas transitoris per 31 Desember 2025 menunjukkan arus kas bersih sebesar Rp0,00.

F.1.3. SALDO AKHIR KAS DAN BANK

Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.582.392.592,00 merupakan kas yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas di tahun berikutnya. Dibandingkan dengan Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp2.937.097.225,00, kas di akhir tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.645.295.367,00 atau 90,06 persen. Hal tersebut terjadi karena adanya efisiensi dan optimisasi anggaran yang mengakibatkan beberapa anggaran belanja tidak dapat direalisasikan sehingga saldo akhir kas dan bank per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut juga didukung oleh penerimaan BBSPJPPI tahun 2025 yang melebihi target. Rincian Saldo Akhir Kas dan Bank disajikan sebagai berikut.

*Tabel 84
Rincian Saldo Akhir Kas dan Bank
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kenaikan /Penurunan Kas	2.645.295.367,00	(961.786.427,00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	0,00
Saldo Awal Kas	2.937.097.225,00	3.898.883.652,00
Jumlah Saldo Akhir Kas dan Bank	5.582.392.592,00	2.937.097.225,00

F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri diuraikan sebagai berikut.

F.2.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Satker selama satu periode yang berakhir pada tanggal pelaporan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31

Desember 2025 sebesar Rp4.820.911.376,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 85
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Arus Kas Masuk	37.855.499.756,00	40.704.271.299,00
Dikurangi Arus Kas Keluar	(33.034.588.380,00)	(32.020.630.145,00)
Arus Kas Bersih	4.820.911.376,00	8.683.641.154,00

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Satuan Kerja dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Pada tahun 2025, BBSPJPPI menghasilkan kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp4.820.911.376,00 untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar (44,48) persen dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi di tahun 2024.

F.2.1.1. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi terdiri dari:

Tabel 86
Rincian Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan Alokasi APBN	17.335.122.831,00	22.228.595.676,00
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	20.160.742.350,00	18.047.202.663,00
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	89.441.000,00	306.257.490,00
Pendapatan Usaha Lainnya	156.448.014,00	64.810.470,00
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	76.724.589,00	0,00
Pendapatan PNBPN Umum	37.020.972,00	57.405.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas Operasi	37.855.499.756,00	40.704.271.299,00

Berikut penjelasan dari pendapatan pada arus kas masuk aktivitas operasi:

1. Pendapatan alokasi APBN merupakan penerimaan yang diperoleh Satker atas SP2D dari Rupiah Murni sebesar Rp17.335.122.831,00.
2. Pendapatan Jasa Layanan kepada Masyarakat merupakan penerimaan yang diperoleh Satker atas Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, dan Pelatihan sebesar Rp20.160.742.350,00.
3. Pendapatan Jasa Layanan kepada Entitas Lain merupakan penerimaan yang diperoleh Satker atas Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, dan Pelatihan dalam satu K/L sebesar Rp89.441.000,00.
4. Pendapatan Usaha Lainnya merupakan penerimaan yang diperoleh Satker

atas jasa layanan perbankan sebesar Rp156.448.014,00.

5. Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL merupakan penerimaan yang diperoleh Satker atas pengembalian biaya perjalanan dinas BLU TAYL sebesar Rp76.724.589,00.
6. Pendapatan PNPB Umum merupakan penerimaan yang diperoleh Satker atas pengembalian belanja pegawai TAYL, pengembalian belanja barang TAYL serta penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tuisi sebesar Rp37.020.972,00.

F.2.1.2 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi terdiri dari:

*Tabel 87
Rincian Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pembayaran Pegawai	(16.410.353.467,00)	(14.880.867.879,00)
Pembayaran Barang	(1.234.762.368,00)	(1.964.658.710,00)
Pembayaran Jasa	(7.032.556.444,00)	(6.092.648.700,00)
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(3.865.356.853,00)	(2.805.543.508,00)
Pembayaran Pemeliharaan	(1.330.602.992,00)	(1.598.525.119,00)
Pembayaran Perjalanan Dinas	(3.106.703.281,00)	(4.620.981.229,00)
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	(54.252.975,00)	(57.405.000,00)
Jumlah Arus Keluar Kas Operasi	(33.034.588.380,00)	(32.020.630.145,00)

Berikut penjelasan dari pembayaran pada arus kas keluar aktivitas operasi:

1. Pembayaran Pegawai merupakan pengeluaran yang dilakukan Satker atas pembiayaan pegawai sebesar **(Rp16.410.353.467,00)**.
2. Pembayaran Barang merupakan pengeluaran yang dilakukan Satker atas pembelian barang sebesar **(Rp1.234.762.368,00)**.
3. Pembayaran Jasa merupakan pengeluaran yang dilakukan Satker atas pembayaran jasa yang telah digunakan sebesar **(Rp7.032.556.444,00)**.
4. Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan merupakan pengeluaran yang dilakukan Satker atas pembelian barang yang menghasilkan persediaan untuk keperluan operasional sebesar **(Rp3.865.356.853,00)**.
5. Pembayaran Pemeliharaan merupakan pengeluaran yang dilakukan Satker atas pemeliharaan gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin sebesar **(Rp1.330.602.992,00)**.
6. Pembayaran Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan Satker atas perjalanan dinas yang telah dilaksanakan sebesar

(Rp3.106.703.281,00).

7. Penyetoran PNBP ke Kas Negara merupakan pengeluaran yang dilakukan Satker atas setoran kepada Negara sebesar (Rp54.252.975,00).

F.2.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2025 sebesar (Rp2.175.616.009,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 88

*Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Arus Kas Masuk	17.232.003,00	0,00
Dikurangi Arus Kas Keluar	(2.192.848.012,00)	(9.645.427.581,00)
Arus Kas Bersih	(2.175.616.009,00)	(9.645.427.581,00)

F.2.2.1. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi terdiri dari:

Tabel 89

*Rincian Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	17.232.003,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	17.232.003,00	0,00

Berikut penjelasan dari pendapatan pada arus kas masuk aktivitas investasi:

- Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya merupakan penerimaan yang diperoleh Satker atas penjualan peralatan dan mesin yang tidak dapat digunakan kembali sebesar Rp17.232.003,00.

F.2.2.2. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi terdiri dari:

Tabel 90

*Rincian Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(2.192.848.012,00)	(9.435.284.370,00)
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	0,00	(210.143.211,00)
Jumlah Arus Keluar Kas	(2.192.848.012,00)	(9.645.427.581,00)

Berikut penjelasan dari pembayaran pada arus kas keluar aktivitas investasi:

- Pembayaran atas peralatan dan mesin merupakan pengeluaran yang diperoleh Satker atas pembelian peralatan dan mesin sebagai barang investasi sebesar **(Rp2.192.848.012,00)**.
- Pembayaran atas gedung dan bangunan merupakan pengeluaran yang diperoleh Satker atas pembelian gedung dan bangunan sebagai barang investasi sebesar Rp0,00.
- Perolehan atas aset tetap lainnya/aset lainnya merupakan pengeluaran yang diperoleh Satker atas pembelian aset tetap lainnya atau aset lainnya sebesar Rp0,00.

F.2.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 91
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Dikurangi Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Keluar Bersih	0,00	0,00

F.2.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 92
Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Arus Kas Masuk	795.826.000,00	0,00
Dikurangi Arus Kas Keluar	(795.826.000,00)	0,00
Arus Kas Keluar Bersih	0,00	0,00

F.2.4.1 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris terdiri dari:

Tabel 93
Rincian Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	795.826.000,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	795.826.000,00	0,00

Berikut penjelasan dari pendapatan pada arus kas masuk aktivitas transitoris:

- Penerimaan perhitungan pihak ketiga merupakan penerimaan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima untuk pihak ketiga sebesar Rp795.826.000,00.

F.2.4.2. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris terdiri dari:

Tabel 94
Rincian Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Transitoris
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(795.826.000,00)	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	(795.826.000,00)	0,00

Berikut penjelasan dari pembayaran pada arus kas keluar aktivitas transitoris:

- Pengeluaran perhitungan pihak ketiga merupakan pengeluaran kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima untuk pihak ketiga sebesar (Rp795.826.000,00).

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

G.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan. Saldo Anggaran Lebih Awal pada 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 masing-masing adalah Rp2.937.097.225,00 dan Rp3.898.883.652,00.

G.2. Penggunaan SAL

Penggunaan SAL merupakan penggunaan saldo anggaran lebih di periode tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Penggunaan SAL per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

G.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. SiLPA per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah (Rp14.635.574.489,00) dan (Rp23.132.977.103,00) dengan rincian sebagai berikut.

*Tabel 95
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan Negara	20.537.608.928,00	18.475.675.623,00
Belanja Negara	35.173.183.417,00	41.608.652.726,00
Surplus(Defisit)	(14.635.574.489,00)	(23.132.977.103,00)
SiLPA / (SiKPA)	(14.635.574.489,00)	(23.132.977.103,00)

G.4. Penyesuaian SiLPA/SiKPA

Penyesuaian SiLPA/SiKPA merupakan penyesuaian akibat koreksi maupun penyesuaian pembukuan terhadap SiLPA/SiKPA tahun berjalan. Penyesuaian SiLPA/SiKPA per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

G.5. Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN

Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN merupakan penyesuaian akibat koreksi maupun penyesuaian pembukuan terhadap Transaksi BLU dengan BUN tahun

berjalan. Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp17.280.869.856,00 dan Rp22.171.190.676,00 dengan rincian sebagai berikut.

*Tabel 96
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan Alokasi APBN	17.335.122.831,00	22.228.595.676,00
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	(54.252.975,00)	(57.405.000,00)
Jumlah Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	17.280.869.856,00	22.171.190.676,00

1. Penyesuaian pendapatan alokasi APBN merupakan penyesuaian atas pendapatan yang berasal dari SP2D Rupiah Murni DIPA 2025 sebesar Rp17.335.122.831,00.
2. Penyesuaian penyetoran PNBPN ke kas negara merupakan penyesuaian atas penyetoran yang terdiri dari sewa rumah dinas, lelang BMN, serta pengembalian belanja barang dan pegawai TAYL sebesar (Rp54.252.975,00).

G.6.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian

Nilai SiLPA/SiKPA setelah koreksi SiLPA/SiKPA per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp2.645.295.367,00 dan (Rp961.786.427,00). Nilai ini naik sebesar Rp3.607.081.794,00 atau 375,04 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

G.7. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Lain-lain

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain merupakan koreksi terhadap nilai pada pembukuan tahun sebelumnya dan koreksi lain-lain. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Sedangkan koreksi lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

G.8. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp5.582.392.592,00 dan Rp2.937.097.225,00. Nilai ini naik sebesar Rp2.645.295.367,00 atau 90,06 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

H. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

H.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian setelah tanggal neraca di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri yang dapat mempengaruhi penyajian pada Laporan Keuangan Satker untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025.

H.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

H.2.1. PENGUNGKAPAN INFORMASI PAGU BLOKIR

Pada tahun anggaran 2025 terdapat pagu yang diblokir sebesar (Rp4.942.674.000,00). Atas pagu yang diblokir tersebut telah diusulkan 3 kali relaksasi blokir sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 menyisakan pagu yang masih diblokir sebesar (Rp4.942.674.000,00). Rincian pagu blokir pada tahun anggaran 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 97
Pagu Efektif per Jenis Belanja Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu	Pagu Blokir	Pagu Efektif
1	Belanja Pegawai	16.501.120.000,00	0,00	16.501.120.000,00
2	Belanja Barang	18.684.267.000,00	(1.857.943.000,00)	16.826.324.000,00
3	Belanja Modal	5.280.576.000,00	(3.084.731.000,00)	2.195.845.000,00
	Total	40.465.963.000,00	(4.942.674.000,00)	35.523.289.000,00

Berdasarkan pagu efektif tersebut berikut disajikan rincian perbandingan anggaran dengan realisasi anggaran belanja tahun 2025.

Tabel 98
Perbandingan Pagu Efektif dan Realisasi per Jenis Belanja Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu Efektif	Realisasi T.A. 2025	%
1	Belanja Pegawai	16.501.120.000,00	16.410.353.467,00	99,45
2	Belanja Barang	16.826.324.000,00	16.569.981.938,00	98,48
3	Belanja Modal	2.195.845.000,00	2.192.848.012,00	99,86
	Total	35.523.289.000,00	35.173.183.417,00	99,01

H.2.2. PENGUNGKAPAN CAPAIAN RINCIAN OUTPUT PER FUNGSI APBN

Pelaporan data capaian rincian output merupakan bagian dari pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, data capaian rincian output dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran. Dasar hukum dalam pelaksanaannya ialah Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Capaian rincian output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri antara lain:

1. **Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Pencegahan Pencemaran Industri**
Kegiatan sosialisasi dan diseminasi layanan teknis pencegahan pencemaran industri mencakup sosialisasi dan publikasi layanan jasa teknis, dengan target output sebanyak 200 orang. Berdasarkan anggaran dari kegiatan tersebut, BBSPJPPI mengadakan *Business Gatering* yang dihadiri oleh 178 orang dari berbagai industri. *Business Gatering* diadakan oleh Satker sebagai sarana promosi dan publikasi jasa layanan terbaru BBSPJPPI khususnya dalam penanganan pencemaran menuju industri hijau ramah lingkungan. Selain itu BBSPJPPI juga mengikuti kegiatan pameran yaitu 3rd POMI 2025 (8-10 Juli 2025), AIGIS (20-22 Agustus 2025), HALAL EXPO (25-28 September 2025), INDI 4.0 (17-18 September 2025) yang melibatkan partisipasi sejumlah 108 orang. Sehingga realisasi capaian rincian output sebanyak 286 orang atau melebihi target output.
2. **Jasa Pelayanan Teknis Pengujian Pencegahan Pencemaran Industri**
Kegiatan jasa pelayanan teknis pengujian pencegahan pencemaran industri mencakup jasa pelayanan teknis pengujian serta akreditasi/surveillance/reakreditasi dan pengembangan kelembagaan laboratorium pengujian, dengan target output sebanyak 480 industri. Berdasarkan anggaran dari kegiatan tersebut, BBSPJPPI telah melakukan pelayanan jasa pengujian kepada 506 industri. Realisasi tersebut melebihi target seiring dengan meningkatnya pendapatan jasa layanan Satker.
3. **Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi Pencegahan Pencemaran Industri**

Kegiatan jasa pelayanan teknis kalibrasi pencegahan pencemaran industri mencakup jasa pelayanan teknis kalibrasi serta akreditasi/surveillance/reakreditasi dan pengembangan kelembagaan laboratorium kalibrasi, dengan target output sebanyak 31 industri. Berdasarkan anggaran dari kegiatan tersebut, BBSPJPPI telah melakukan pelayanan jasa kalibrasi kepada 53 industri. Realisasi tersebut melebihi target seiring dengan meningkatnya pendapatan jasa layanan Satker.

4. Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri

Kegiatan jasa pelayanan teknis sertifikasi pencegahan pencemaran industri mencakup jasa pelayanan teknis sertifikasi serta akreditasi/surveillance/reakreditasi dan pengembangan kelembagaan laboratorium sertifikasi, dengan target output sebanyak 240 industri. Berdasarkan anggaran dari kegiatan tersebut, BBSPJPPI telah melakukan pelayanan jasa sertifikasi kepada 261 industri. Realisasi tersebut melebihi target seiring dengan meningkatnya pendapatan jasa layanan Satker.

5. Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri Pencegahan Pencemaran Industri

Kegiatan jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri pencegahan pencemaran industri mencakup jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri, dengan target output sebanyak 5 industri. Berdasarkan anggaran dari kegiatan tersebut, BBSPJPPI telah melakukan pelayanan jasa bimbingan dan pendampingan teknis kepada 26 industri. Realisasi tersebut melebihi target seiring dengan meningkatnya pendapatan jasa layanan Satker.

6. Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis Pencegahan Pencemaran Industri

Kegiatan jasa pelayanan inspeksi teknis pencegahan pencemaran industri mencakup pelayanan inspeksi teknis dan verifikasi industri, dengan target output sebanyak 10 industri. Berdasarkan anggaran dari kegiatan tersebut, BBSPJPPI telah melakukan pelayanan jasa verifikasi TKDN kepada 37 industri. Realisasi tersebut melebihi target seiring dengan meningkatnya pendapatan jasa layanan Satker.

7. Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Pencegahan Pencemaran

Industri

Kegiatan jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri pencegahan pencemaran industri mencakup layanan konsultasi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri serta kolaborasi pemanfaatan dan penerapan teknologi industri, dengan target output sebanyak 18 industri. Berdasarkan anggaran dari kegiatan tersebut, BBSPJPPI telah melakukan pelayanan jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi kepada 50 industri. Realisasi tersebut melebihi target seiring dengan meningkatnya pendapatan jasa layanan Satker.

8. Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi Pencegahan Pencemaran Industri

Kegiatan jasa pelayanan teknis uji profisiensi pencegahan pencemaran industri mencakup jasa pelayanan teknis uji profisiensi dan akreditasi/surveillance/ reakreditasi dan pengembangan kelembagaan penyelenggara uji profisiensi, dengan target output sebanyak 15 industri. Berdasarkan anggaran dari kegiatan tersebut, BBSPJPPI telah melakukan pelayanan jasa uji profisiensi kepada 49 industri. Realisasi tersebut melebihi target seiring dengan meningkatnya pendapatan jasa layanan Satker.

9. Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan Pencegahan Pencemaran Industri

Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan pencegahan pencemaran industri mencakup pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan, dengan target output sebanyak 45 unit. Berdasarkan anggaran yang tersedia untuk pengadaan peralatan tersebut, BBSPJPPI telah melakukan pengadaan peralatan sebanyak 28 unit. Pengadaan peralatan tersebut meliputi pengadaan 3 unit Termohigrometer Ruangan, 1 unit Centrifuge, 2 unit Surber Net, 2 unit Van Dorn Horizontal Water Sampler, 2 unit Well Water Sampler, 2 unit Current Meter, 1 unit pH Meter benchtop, 1 unit pH Meter portable, 1 unit Portable High Performance Zero Air System, 1 unit Portable Gas Calibrator, 1 unit Incubator BOD, 1 unit Lemari Asam, 2 unit Heating Mantle, 1 unit Hotplate Multi Position, 2 unit Anti Vibration Bench, 1 unit Lemari Bahan Kimia Anti Korosi, 1 unit ORP, 1 unit Chart Recorder, dan 1 unit Showcase 2 Pintu. Realisasi tersebut belum mencapai target output yang telah direncanakan karena terkena dampak

efisiensi dan optimalisasi anggaran.

10. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

Layanan hubungan masyarakat dan informasi mencakup pengelolaan data dan informasi, dengan target output sebanyak 1 layanan. Berdasarkan anggaran dari kegiatan tersebut, BBSPJPPI telah melakukan 1 layanan hubungan masyarakat dan informasi berupa pengembangan teknologi informasi. Layanan tersebut dilakukan untuk meningkatkan performa sistem informasi yang dikelola BBSPJPPI.

11. Layanan Umum

Layanan umum mencakup pelayanan tata usaha dan rumah tangga, dengan target output sebanyak 1 layanan. Berdasarkan anggaran dari kegiatan tersebut, BBSPJPPI telah melakukan 1 layanan umum berupa jasa surveilen 9001:2025 oleh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik.

12. Layanan Perkantoran

Layanan perkantoran mencakup gaji dan tunjangan, serta operasional dan pemeliharaan kantor, dengan target output sebanyak 1 layanan. Berdasarkan anggaran dari kegiatan tersebut, BBSPJPPI telah melakukan 1 layanan perkantoran berupa pemeliharaan gedung dan bangunan kantor melalui SPK No. 610/BBSPJPPI/PBJ/XI/2025 tanggal 19 November 2025 oleh PT. Aegis Ultima Teknologi.

13. Layanan Sarana Internal

Layanan sarana internal mencakup pengadaan peralatan inventaris perkantoran, dengan target output sebanyak 90 unit. Berdasarkan anggaran yang tersedia untuk pengadaan peralatan tersebut, BBSPJPPI telah melakukan pengadaan peralatan sebanyak 41 unit. Pengadaan perangkat dan peralatan meliputi pengadaan 24 unit Kursi Kerja, 5 unit AC 2 PK, 2 unit Smart TV 43 Inch, 6 unit Meja Kubikal Isi 4, 1 unit AC 1 PK, 1 unit Smart TV 55 inch, dan 2 unit Kursi Pimpinan Rapat. Realisasi tersebut belum mencapai target output yang telah direncanakan karena terkena dampak efisiensi dan optimalisasi anggaran.

14. Layanan Prasarana Internal

Layanan prasarana internal mencakup pembangunan/renovasi gedung dan bangunan, dengan target output sebanyak 1 layanan. Namun, anggaran untuk kegiatan tersebut terkena dampak efisiensi dan optimalisasi sehingga Satker belum bisa melaksanakan kegiatan dan merealisasikan pengeluarannya. Walaupun demikian Satker tetap dapat melakukan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan kantor menggunakan sumber anggaran lain sehingga menghasilkan output setidaknya sebanyak 1 layanan prasarana internal.

15. Layanan Manajemen SDM

Layanan manajemen sumber daya manusia mencakup pengelolaan/manajemen SDM, dengan target output sebanyak 107 orang. Berdasarkan anggaran dari kegiatan tersebut, BBSPJPPI telah melakukan layanan manajemen SDM kepada 123 orang pegawai BBSPJPPI.

16. Layanan Pendidikan dan Pelatihan

Layanan pendidikan dan pelatihan mencakup kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM, dengan target output sebanyak 55 orang. Berdasarkan anggaran dari kegiatan tersebut, BBSPJPPI telah melakukan layanan pendidikan dan pelatihan kepada 123 orang pegawai BBSPJPPI melalui berbagai kegiatan pelatihan yang sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing pegawai. Layanan tersebut dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan pegawai BBSPJPPI untuk melakukan pelayanan jasa yang lebih baik bagi pelanggan.

17. Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Layanan perencanaan dan penganggaran mencakup kegiatan penyusunan rencana program dan anggaran, dengan target output sebanyak 2 dokumen. Berdasarkan anggaran dari kegiatan tersebut, BBSPJPPI telah menghasilkan 2 dokumen berupa Laporan Rencana Kinerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan.

18. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Layanan pemantauan dan evaluasi mencakup kegiatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dengan target output sebanyak 2 dokumen.

Berdasarkan anggaran dari kegiatan tersebut, BBSPJPPI telah menghasilkan 2 dokumen berupa Laporan PP 39 bulan Juni dan Desember.

19. Layanan Manajemen Keuangan

Layanan manajemen keuangan mencakup kegiatan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, dengan target output sebanyak 2 dokumen. Berdasarkan anggaran dari kegiatan tersebut, BBSPJPPI telah menghasilkan 2 dokumen berupa Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Keuangan Tahunan.

20. Layanan Reformasi Kinerja

Layanan reformasi kinerja mencakup kegiatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP, dengan target output sebanyak 2 dokumen. Berdasarkan anggaran dari kegiatan tersebut, BBSPJPPI telah menghasilkan 2 dokumen berupa Laporan Zona Integritas dan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

H.2.3. PENGUNGKAPAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri tidak terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN). Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Pelaksanaannya dilakukan realisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Satuan Kerja : Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

Program/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
Nihil	-	-	-	-	-	-	-

2. Prioritas Nasional 03 – Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi. Pelaksanaannya dilakukan realisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Satuan Kerja : Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

Program/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
Nihil	-	-	-	-	-	-	-

3. Prioritas Nasional 04 – Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.

Pelaksanaannya dilakukan realisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Satuan Kerja : Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

Program/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
Nihil	-	-	-	-	-	-	-

4. Prioritas Nasional 05 – Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

Pelaksanaannya dilakukan realisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Satuan Kerja : Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

Program/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
Nihil	-	-	-	-	-	-	-

5. Prioritas Nasional 06 – Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

Pelaksanaannya dilakukan realisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Satuan Kerja : Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

Program/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
Nihil	-	-	-	-	-	-	-

H.2.4. PENGUNGKAPAN PENGGUNAAN SALDO AWAL KAS BLU

Nama Akun	Kode Akun	Output / Rincian Akun	PAGU	Realisasi	Sisa Pagu
Belanja Jasa	6077.BAD.002.051.5 25113.A	000728. Biaya pengujian ke pihak lain	1.105.258.000	1.021.367.320	83.890.680
Belanja Persediaan Barang Konsumsi	6077.BAD.002.051.5 25121.B	000729. Bahan kimia dan bahan penolong	996.060.000	995.242.569	817.431
Belanja Persediaan Barang Pemeliharaan	6077.BAD.002.051.5 25123.B	000730. Spare part/aksesoris peralatan pengujian Pengendalian Pencemaran	222.064.000	221.798.879	265.121
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan	6077.BAD.057.051.5 25123.B	000733. Spare part/aksesoris komponen AiMS	90.374.000	90.373.980	20
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku	6077.BAD.057.051.5 25126.B	000731. Bahan baku produksi AiMS Udara (AIMS AQM)	54.708.000	54.707.460	540
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku	6077.BAD.057.051.5 25126.B	000732. Bahan baku produksi AiMS Air (AIMS WQM)	319.680.000	319.680.000	-
TOTAL			2.788.144.000	2.703.170.208	84.973.792

Lampiran A1

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Saldo Awal Per 1 Jan 2025	Mutasi Peny. Per 31 Des 2025	Total Akm. Peny. Per 31 Des 2025	Nilai Buku Per 31 Des 2025
A	Tanah						
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II		2.427.737.000,00	0,00		0,00	2.427.737.000,00
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		97.545.072.000,00	0,00	0,00	0,00	97.545.072.000,00
3	Tanah Persil Lainnya		368.379.000,00	0,00	0,00	0,00	368.379.000,00
4	Tanah Tegal		225.579.000,00	0,00	0,00	0,00	225.579.000,00
	Sub Jumlah		100.566.767.000,00	0,00	0,00	0,00	100.566.767.000,00
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Bantu	7	80.903.000,00	(53.498.787,00)	(6.087.932,00)	(59.586.719,00)	21.316.281,00
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	1.901.283.800,00	(1.703.900.498,00)	(78.953.321,00)	(1.782.853.819,00)	118.429.981,00
3	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	0,00	(1.800.000,00)	1.800.000,00	0,00	0,00
4	Alat Bengkel Bermesin	10	0,00	(16.398.042,00)	16.398.042,00	0,00	0,00
5	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	14.721.000,00	(8.560.500,00)	(2.464.200,00)	(11.024.700,00)	3.696.300,00
6	Alat Ukur	5	238.419.935,00	(238.419.935,00)	0,00	(238.419.935,00)	0,00
7	Alat Kantor	5	907.357.956,00	(572.131.070,00)	(81.542.045,00)	(653.673.115,00)	253.684.841,00
8	Alat Rumah Tangga	5	2.429.839.152,00	(1.623.663.901,00)	(184.884.521,00)	(1.808.548.422,00)	621.290.730,00
9	Alat Studio	5	340.110.125,00	(292.242.940,00)	(38.750.123,00)	(330.993.063,00)	9.117.062,00
10	Alat Komunikasi	5	166.976.700,00	(161.560.500,00)	31.570.400,00	(129.990.100,00)	36.986.600,00
11	Alat Kedokteran	5	43.710.111,00	(36.519.081,00)	(4.794.021,00)	(41.313.102,00)	2.397.009,00
12	Unit Alat Laboratorium	8	31.368.033.625,00	(25.340.485.070,00)	(871.458.462,00)	(26.211.943.532,00)	5.156.090.093,00
13	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	474.967.538,00	(219.508.373,00)	(28.618.684,00)	(248.127.057,00)	226.840.481,00
14	Unit Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	387.664.711,00	(1.107.767.680,00)	922.786.184,00	(184.981.496,00)	202.683.215,00
15	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10	7.650.000,00	(5.737.500,00)	(765.000,00)	(6.502.500,00)	1.147.500,00
16	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	10	112.080.000,00	(33.622.500,00)	(10.923.000,00)	(44.545.500,00)	67.534.500,00
17	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	14.977.409.316,00	(7.550.740.468,00)	(1.348.786.118,00)	(8.899.526.586,00)	6.077.882.730,00
18	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15	27.020.000,00	(11.207.334,00)	(1.801.333,00)	(13.008.667,00)	14.011.333,00
19	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	10	1.696.007.500,00	(1.286.233.535,00)	(67.081.214,00)	(1.353.314.749,00)	342.692.751,00
20	Komputer Unit	4	1.495.676.500,00	(1.432.796.500,00)	26.927.500,00	(1.405.869.000,00)	89.807.500,00
21	Peralatan Komputer	4	530.756.895,00	(488.570.457,00)	(24.565.813,00)	(513.136.270,00)	17.620.625,00
22	Pengolahan dan Pemurnian	15	368.730.700,00	(178.352.754,00)	(24.582.047,00)	(202.934.801,00)	165.795.899,00
23	Unit Peralatan Proses/Produksi	8	99.620.380,00	(95.937.013,00)	(3.361.461,00)	(99.298.474,00)	321.906,00
24	Peralatan Olahraga	3	34.150.000,00	(34.150.000,00)	0,00	(34.150.000,00)	0,00
	Sub Jumlah		57.703.088.944,00	(42.493.804.438,00)	(1.779.937.169,00)	(44.273.741.607,00)	13.429.347.337,00
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat	50	19.350.609.088,00	(5.054.844.929,00)	(1.050.010.864,00)	(6.104.855.793,00)	13.245.753.295,00
2	Bangunan Gedung Tempat	50	487.325.000,00	(342.799.664,00)	(13.138.666,00)	(355.938.330,00)	131.386.670,00
	Sub Jumlah		19.837.934.088,00	(5.397.644.593,00)	(1.063.149.530,00)	(6.460.794.123,00)	13.377.139.965,00
D	Irigasi						
1	Bangunan dan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	30	3.586.000,00	(1.680.938,00)	(224.125,00)	(1.905.063,00)	1.680.937,00
2	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40	18.321.000,00	(8.865.000,00)	(1.182.000,00)	(10.047.000,00)	8.274.000,00
	Sub Jumlah		21.907.000,00	(10.545.938,00)	(1.406.125,00)	(11.952.063,00)	9.954.937,00
E	Aset Tetap Lainnya						
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	1	10.343.211,00	0,00	0,00	0,00	10.343.211,00
	Sub Jumlah		10.343.211,00	0,00	0,00	0,00	10.343.211,00
F	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan						
1	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(1.800.000,00)	0,00
2	Alat Bengkel Bermesin		21.678.042,00	0,00	(18.510.042,00)	(18.510.042,00)	3.168.000,00
3	Alat Kantor		14.692.077,00	0,00	(14.692.077,00)	(14.692.077,00)	0,00
4	Alat Rumah Tangga		85.746.115,00	0,00	(85.746.115,00)	(85.746.115,00)	0,00
5	Alat Komunikasi		42.824.500,00	0,00	(42.824.500,00)	(42.824.500,00)	0,00
6	Unit Alat Laboratorium		1.501.500,00	0,00	(1.501.500,00)	(1.501.500,00)	0,00
7	Unit Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika		112.527.000,00	0,00	(56.132.300,00)	(56.132.300,00)	56.394.700,00
8	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup		1.720.950,00	0,00	(1.720.950,00)	(1.720.950,00)	0,00
9	Komputer Unit		73.700.000,00	0,00	(73.700.000,00)	(73.700.000,00)	0,00
	Sub Jumlah		356.190.184,00	0,00	(296.627.484,00)	(296.627.484,00)	59.562.700,00
	Jumlah		178.496.230.427,00	(47.901.994.969,00)	(3.141.120.308,00)	(51.043.115.277,00)	127.453.115.150,00